

RENCANA STRATEGIS

2025-2029



djdag.
kukm



Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
Dinas Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah

Jalan Ki Hajar Dewantara No. 18 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telp. (0414) 21028 / 21073

LAMPIRAN XIX
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
TAHUN 2025-2029



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Ki Hajar Dewantara No. 18 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan

Telp. (0414) 21028 / 21073

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH

Nomor : 239/VI/2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH

TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta untuk menjamin keterpaduan perencanaan pembangunan daerah, perlu disusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
- b. bahwa Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi, dan UMKM, telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2025–2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025–2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 135);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 138).

Memperhatikan : Hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah bersama para pemangku kepentingan, serta rekomendasi dari Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025–2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025–2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Renstra sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyelenggaraan program,

kegiatan, dan subkegiatan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selama periode tahun 2025–2029.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Benteng
Pada tanggal : 13 Juni 2025
Kepala Dinas,

ANDI ABDURRAHMAN, S.E., M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19670526 199703 1 005

Tembusan :

1. Bupati Kepulauan Selayar di Benteng
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng
3. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng
4. Arsip.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025–2029 dapat disusun sebagai pedoman perencanaan jangka menengah untuk pelaksanaan program dan kegiatan dinas dalam lima tahun ke depan.

Penyusunan dokumen Renstra ini bertujuan untuk memperjelas arah pembangunan sektor perdagangan, koperasi, dan usaha kecil menengah yang memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rencana Strategis (Renstra) ini disusun dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar, serta selaras dengan misi Bupati dan Wakil Bupati, khususnya dalam mendukung misi :

1. Meningkatkan Pengelolaan Pemerintahan yang Akuntabel dan Adaptif
2. Meningkatkan Pengelolaan Perekonomian Daerah, dan
3. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Perdesaan.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang perdagangan, pengembangan koperasi, serta pemberdayaan UMKM, Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Kepulauan Selayar menetapkan arah strategis dengan delapan tujuan utama yang saling terintegrasi. Tujuan tersebut antara lain mencakup penguatan tata kelola birokrasi yang transparan dan akuntabel, pengembangan sektor industri kecil dan menengah yang berdaya saing, mewujudkan koperasi modern dan sehat sebagai pilar ekonomi rakyat, transformasi UMKM berbasis teknologi, penguatan ekosistem usaha melalui pembiayaan dan digitalisasi, optimalisasi perdagangan daerah yang efisien dan berpihak pada pelaku lokal, serta penguatan peran koperasi dalam ekonomi desa.

Seluruh tujuan tersebut diturunkan ke dalam sasaran strategis yang terukur, lengkap dengan indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan implementasi. Setiap sasaran didukung oleh strategi utama dan arah kebijakan yang disusun secara sistematis untuk menjawab isu aktual pembangunan dan tantangan sektor yang dinamis.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor, kolaborasi dengan stakeholder, dan partisipasi aktif masyarakat serta pelaku usaha. Oleh karena itu, dokumen ini juga menjadi instrumen akuntabilitas publik sekaligus komitmen institusi dalam mendorong transformasi sektor perdagangan, koperasi, dan UMKM di Kabupaten Kepulauan Selayar yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan dukungan dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Renstra ini dapat menjadi landasan strategis yang kuat dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan pembangunan ekonomi daerah yang berkeadilan.

Benteng, 25 September 2025

KEPALA DINAS,

ANDI ABDURRAHMAN, S.E., M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19670526 199703 1 005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LAMPIRAN XIX	
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN RENSTRA	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAEARAH	8
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	8
a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD	8
b. Sumber Daya Perangkat Daerah	12
c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15
d. Kelompok Sasaran Pelayanan	18
e. Mitra Perangkat Daerah	19
f. Dukungan BUMD	20
g. Kerja Sama Daerah	22
2.2 Permasalahan dan isu strategis Perangkat daerah	21
a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	22
b. Isu Strategis	23
c. Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan	23
d. Tantangan dan Peluang Pengembangan	25
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	30
3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah	31
3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah	33
3.3 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan	34
3.4 Penahapan Renstra	42
3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra	44
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	48
4.1 Kerangka Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renstra	48
4.2 Teknik Merumuskan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renstra	50
4.3 Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan	68

4.4	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	82
4.5	Indikator Kinerja Utama (IKU)	90
4.6	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	92
4.7	Analisis Kesesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK)	94
4.8	Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis	96
BAB V	PENUTUP	99
	Kesimpulan	99

DAFTAR TABEL

Tabel	2.c	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
Tabel	2.d	Kelompok Sasaran Pelayanan	18
Tabel	2.e	Mitra Strategi	19
Tabel	2.1.	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis	28
Tabel	3.3.	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran	39
Tabel	3.4.	Penahapan Renstra	43
Tabel	3.5.	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan	46
Tabel	4.2.	Perumusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	51
Tabel	4.3.	Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan	69
Tabel	4.4.	Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	84
Tabel	4.5.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	91
Tabel	4.6.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	93
Tabel	4.7.	Analisis Kesesuaian IKU dengan IKK	95
Tabel	4.8.	Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1.	Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra PD	2
Gambar	2.1.	Struktur Organisasi Perangkat Daerah	11
Gambar	3.1.	Konsep Renstra	32
Gambar	3.2.	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra	33
Gambar	4.1.	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan strategis yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan sektoral selama lima tahun ke depan. Rencana Strategis (Renstra) OPD merupakan dokumen penting yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah, terutama dalam pemberdayaan pelaku usaha lokal, penguatan koperasi, pengembangan pasar rakyat, dan penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM. Di tengah tantangan global, dinamika pasar, serta dampak dari perubahan sosial dan ekonomi, diperlukan perencanaan yang terarah, responsif, dan adaptif agar sektor perdagangan dan UMKM di Kepulauan Selayar mampu tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

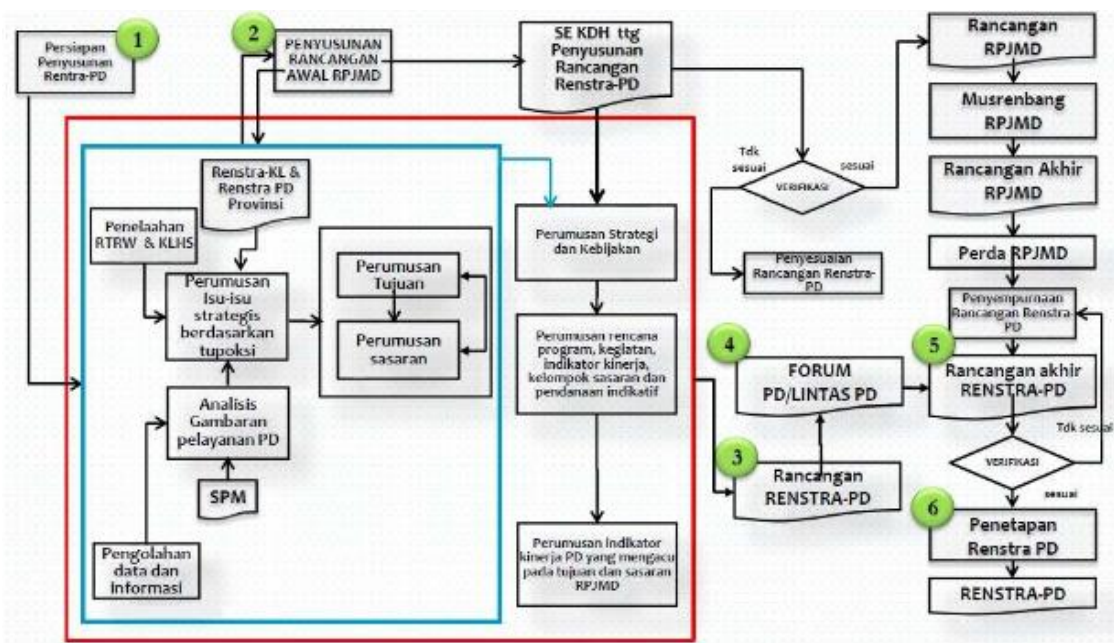
Penyusunan Renstra ini dilaksanakan sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Renstra Perangkat Daerah. Oleh karena itu, Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar disusun sebagai pedoman strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dinas, serta sebagai landasan dalam pengukuran kinerja dan pertanggungjawaban publik.

Dengan adanya dokumen Renstra ini, diharapkan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat meningkatkan efektivitas pelayanannya kepada masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan. Selain itu, dokumen ini juga menjadi acuan strategis dalam memperkuat kapasitas kelembagaan, tata kelola, serta koordinasi lintas sektor yang lebih sinergis dan responsif. Pada akhirnya, upaya ini ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif,

berdaya saing tinggi, serta berbasis pada potensi lokal yang dimiliki oleh Kepulauan Selayar.

Proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 dilakukan melalui tahapan yang sistematis, meliputi persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum-forum perangkat daerah, hingga penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra. Pendekatan yang komprehensif ini memastikan bahwa strategi serta program kerja yang dirancang dapat terintegrasi secara harmonis dengan visi dan misi pembangunan daerah, sekaligus menjawab kebutuhan para pelaku perdagangan, koperasi, dan usaha kecil menengah di Kabupaten Kepulauan Selayar. Dengan demikian, Renstra ini menjadi pijakan utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memperkuat peran koperasi, serta meningkatkan daya saing usaha kecil dan menengah selama periode 2025-2029.

Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra PD
Berdasarkan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025



1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dan pedoman dalam perencanaan pembangunan daerah. Landasan hukum ini memberikan legitimasi serta memastikan bahwa proses perencanaan dilakukan secara sistematis, terarah, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 135);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 138).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar dilaksanakan sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada hasil. Dokumen ini disusun untuk memberikan arah, pedoman, serta kerangka acuan strategis bagi seluruh pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Renstra ini juga dimaksudkan untuk menjamin konsistensi antara kebijakan daerah dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

a. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah selama periode lima tahun. Renstra ini disusun sebagai bentuk penjabaran dari visi, misi, tujuan, dan sasaran kepala daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2025, serta untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra ini antara lain :

1. Menyediakan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan program serta kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selama periode perencanaan.
2. Menjamin keterpaduan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, serta penganggaran program/kegiatan di lingkungan dinas.
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja organisasi melalui perumusan indikator kinerja utama.
4. Menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan perangkat daerah.
5. Mendorong transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kepada masyarakat.

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kejelasan struktur, arah kebijakan, serta kemudahan dalam memahami isi dokumen, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar disusun secara sistematis dan terstruktur. Penyusunan ini mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Surat Edaran Bupati Kepulauan Selayar Nomor 289/III.7.2/V/2025 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Renstra ini bertujuan menjadi pedoman kerja yang jelas dalam menjalankan program dan kegiatan selama lima tahun ke depan. Dengan struktur yang terorganisir, dokumen ini diharapkan memudahkan pemangku kepentingan dalam melakukan evaluasi dan pengendalian kebijakan. Renstra ini terdiri dari lima bab utama, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar, termasuk landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaannya. Selain itu, bab ini menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Renstra ini sebagai pedoman strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan OPD. Bab ini juga memaparkan sistematika penulisan dokumen sebagai panduan agar pembaca memahami struktur dan isi dokumen Renstra secara keseluruhan;

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan gambaran pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kepulauan Selayar, meliputi tugas, fungsi, struktur, sumber daya, kinerja pelayanan, serta kelompok sasaran layanan. Selain itu, bab ini juga membahas permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan dan isu-isu strategis yang menjadi fokus prioritas dalam pengembangan dan peningkatan kualitas layanan perangkat daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029. Selain itu, bab ini menjelaskan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja selama periode Renstra.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memaparkan program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kepulauan Selayar. Pembahasan mencakup uraian kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif subkegiatan, serta dukungan terhadap program prioritas pembangunan daerah. Selain itu, bab ini juga menguraikan target keberhasilan pencapaian tujuan Renstra melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting yang bersifat substansial terkait pelaksanaan perencanaan dan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah. Selain itu, bab ini juga menguraikan kaidah-kaidah pelaksanaan serta mekanisme pengendalian dan evaluasi sebagai upaya memastikan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAH DAN ISU STRATEGIS

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disdag.KUKM) Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang menjalankan kewenangan di bidang perdagangan, koperasi, dan usaha kecil menengah. Sebagai perangkat daerah, Disdag.KUKM memiliki tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan, terutama dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan penguatan sektor perdagangan, pemberdayaan koperasi, serta pengembangan UMKM di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pelayanan yang diberikan oleh Disdag.KUKM bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku ekonomi lokal, membuka peluang usaha dan lapangan kerja, serta menciptakan ekosistem usaha yang kondusif, inklusif, dan berkeadilan. Dalam konteks pembangunan daerah, layanan ini berperan penting dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan.

Bab ini secara khusus akan menguraikan bentuk-bentuk pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Disdag.KUKM selama periode tahun 2021 hingga 2024, yang dianalisis berdasarkan capaian kinerja, kelompok sasaran, serta dukungan sumber daya dan kelembagaan. Selain itu, bab ini juga memuat identifikasi permasalahan yang dihadapi, baik secara internal maupun eksternal, serta isu-isu strategis yang dinilai krusial dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan sektor perdagangan, koperasi, dan UMKM pada periode perencanaan selanjutnya.

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah serta mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan, terarah, dan berdampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan peran strategis dari setiap perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimilikinya. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu perangkat daerah yang menjalankan fungsi teknis operasional di bidang ekonomi, khususnya dalam pengembangan sektor perdagangan, penguatan kelembagaan koperasi, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sebagai pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Dinas ini diberikan mandat untuk melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis

potensi lokal dan berorientasi pada peningkatan daya saing usaha masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap tugas pokok, fungsi, serta struktur organisasi dinas menjadi penting sebagai dasar dalam menyusun perencanaan strategis yang tepat sasaran, efisien, dan akuntabel. Uraian berikut ini menjelaskan tugas, fungsi, serta struktur organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi pijakan dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) untuk periode lima tahun ke depan, dapat dilihat sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan kewenangan di bidang perdagangan, koperasi, serta usaha kecil dan menengah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, dinas bertanggung jawab menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis, melakukan pembinaan, pemberdayaan, fasilitasi, serta pengawasan terhadap pelaku usaha dan koperasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Seluruh kegiatan dan program yang dijalankan oleh dinas senantiasa berpedoman pada peraturan yang berlaku, serta sejalan dengan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang berkualitas.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan, koperasi, dan UMKM;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan usaha, perizinan usaha perdagangan, pembinaan koperasi, serta pemberdayaan UMKMI;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi-fungsi tersebut untuk mendukung terwujudnya pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi lokal.

3. Struktur Organisasi

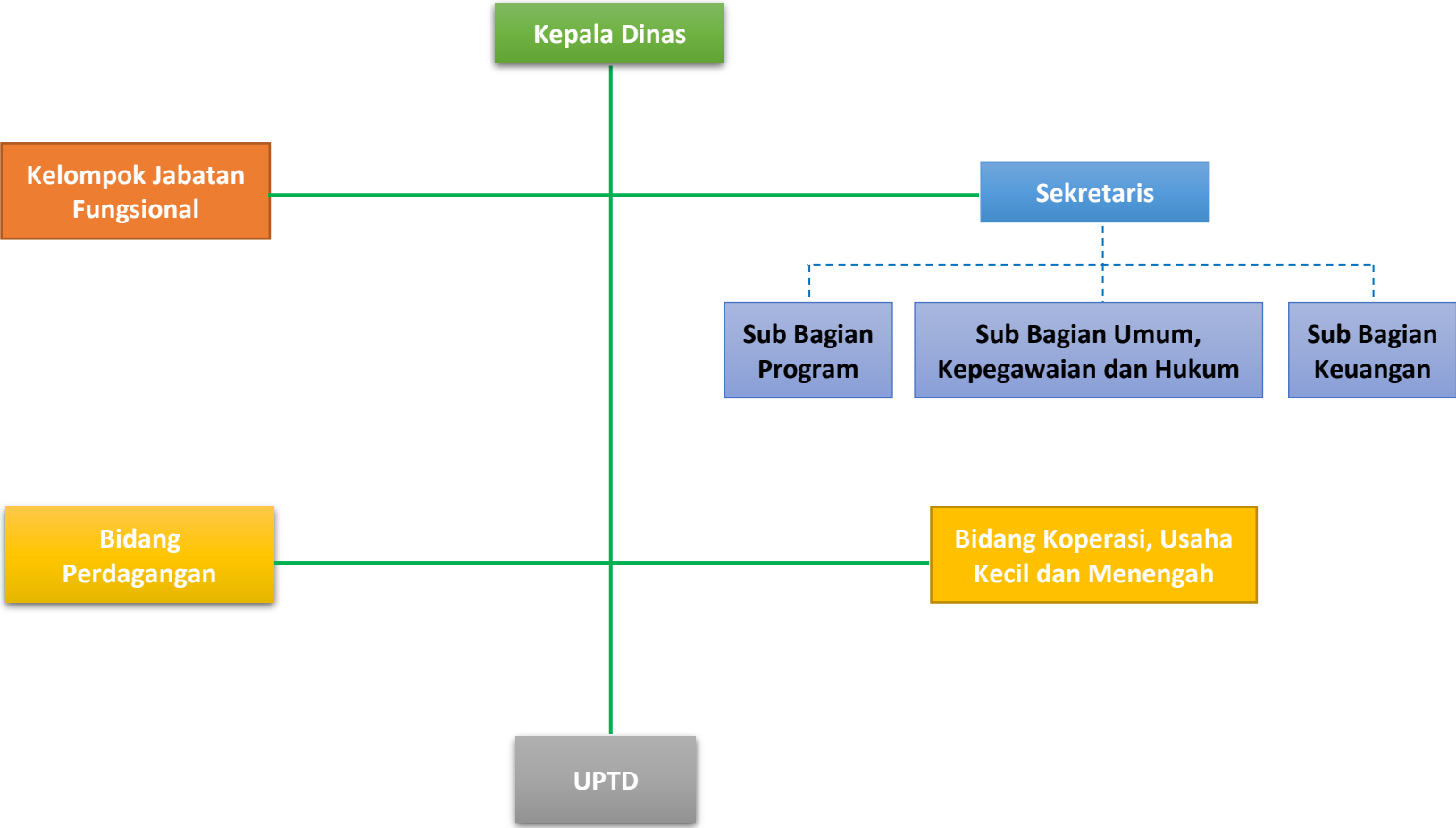
Struktur organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Struktur organisasi perangkat daerah terdiri dari :

- Kepala Dinas
- Sekretariat, yang membawahi :
 - Sub bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum;
 - Sub bagian Program; dan
 - Sub bagian Keuangan.
- Bidang Perdagangan
- Bidang Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Kelompok Jabatan Fungsional
- Unit Pelaksana Teknis Dinas

Struktur organisasi ini dirancang untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis dan administratif secara terpadu, serta untuk memperkuat koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antarunit kerja dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi. Struktur ini juga berperan penting dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang difokuskan pada pengembangan sektor perdagangan, koperasi, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), guna mewujudkan pelayanan publik yang efektif, peningkatan daya saing ekonomi daerah, serta kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Kabupaten Kepulauan Selayar



b. Sumber Daya

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar memerlukan dukungan sumber daya yang memadai, baik dari aspek sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, maupun teknologi informasi. Ketersediaan dan kapasitas sumber daya tersebut sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik serta pencapaian kinerja program dan kegiatan yang direncanakan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra).

Oleh karena itu, pemetaan kondisi sumber daya yang dimiliki menjadi bagian penting dalam penyusunan Renstra, sebagai dasar dalam merumuskan strategi pembangunan jangka menengah dan penentuan prioritas kebijakan dinas selama lima tahun ke depan. Uraian berikut menyajikan kondisi terkini sumber daya yang dimiliki Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, yang meliputi sumber daya aparatur, keuangan, sarana prasarana, serta pemanfaatan teknologi informasi.

1. Sumber Daya Aparatur (SDM)

Sumber daya manusia yang tersedia di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu faktor penunjang utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Personel yang ada terdiri atas pejabat struktural, pejabat fungsional, dan staf pelaksana yang memiliki peran strategis dalam mendukung efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Sampai dengan akhir tahun 2024, jumlah pegawai tercatat sebanyak 27 orang, yang terdiri dari :

a) Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	PNS	PHL	Jumlah
1	S2	8 Orang	-	8 Orang
2	S1	13 Orang	20 Orang	33 Orang
3	D.III	1 Orang	-	1 Orang
4	D.II	-	-	-
5	SMA	5 Orang	12 Orang	17 Orang
6	SD	-	3 Orang	3 Orang
Total		27 Orang	35 Orang	62 Orang

b) Data Pegawai Berdasarkan Pangkat

No	Pangkat	Jumlah
1	Pembina Utama Muda	2 Orang
2	Pembina Tk. 1	-
3	Pembina	3 Orang
4	Penata Tk. 1	8 Orang
5	Penata	4 Orang
6	Penata Muda Tk. 1	6 Orang
7	Penata Muda	2 Orang
8	Pengatur Tk. 1	1 Orang
9	Pengatur Muda Tk. 1	1 Orang
Jumlah		27 Orang

c) Data Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Dinas/Bidang/Seksi	Golongan			Jumlah
		IV	III	II	
1	Kepala Dinas	1 Orang	-	-	1 Orang
2	Sekretariat	1 Orang	5 Orang	1 Orang	7 Orang
3	Perdagangan	2 Orang	7 Orang	1 Orang	10 Orang
4	Koperasi dan UKM	1 Orang	3 Orang	-	4 Orang
5	UPT Pengelolaan Pasar	-	2 Orang	-	2 Orang
Total		5 Orang	17 Orang	2 Orang	24 Orang

d) Jumlah Pejabat Struktural

No	Dinas/Bidang/Seksi	Jumlah
1	Kepala Dinas	1 Orang
2	Sekretaris	1 Orang
3	Kepala Bidang	2 Orang
4	Kepala Sub Bagian	3 Orang
Total		7 Orang

Komposisi tersebut mencerminkan kapasitas organisasi dalam menjalankan peran pelayanan publik di bidang perdagangan, koperasi, serta usaha mikro, kecil, dan menengah. Namun demikian, ke depan diperlukan penguatan kapasitas dan kompetensi aparatur melalui pengembangan sumber daya manusia yang terencana dan berkelanjutan, guna menjawab tantangan dinamika pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

2. Sumber Daya Keuangan

Anggaran Dinas dalam lima tahun terakhir bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik melalui Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung. Rata-rata pagu anggaran per tahun mencapai Rp. 8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah), yang dialokasikan untuk program utama seperti pemberdayaan koperasi, pengembangan UMKM, dan pengelolaan pasar.

Namun, keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan, khususnya dalam pembiayaan kegiatan strategis seperti digitalisasi UMKM, peningkatan kapasitas pelaku usaha, dan pengembangan infrastruktur pasar.

3. Sarana dan Prasarana

Dinas memiliki fasilitas kantor utama, ruang pelayanan, ruang rapat, serta fasilitas pendukung lainnya seperti kendaraan operasional, komputer, jaringan internet, dan perlengkapan kerja lainnya. Namun demikian, sebagian besar sarana perlu pembaruan atau perawatan rutin agar dapat digunakan secara optimal. Di sektor lapangan, masih terdapat kebutuhan peningkatan sarana seperti gerai UMKM, pusat layanan koperasi, serta sarana promosi dan distribusi produk lokal.

4. Teknologi Informasi dan Sistem Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi telah mulai dikembangkan dalam beberapa aspek pelayanan, seperti pengajuan perizinan online, penyediaan informasi program dinas melalui website resmi, serta pelaporan berbasis aplikasi. Namun, integrasi sistem informasi yang terpadu antar bidang masih perlu ditingkatkan agar lebih efektif dalam mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Inovasi berbasis digital seperti e-pasar, data center UMKM, dan sistem pengawasan harga komoditas juga menjadi fokus pengembangan dalam periode mendatang.

Secara umum, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah memiliki sumber daya dasar yang relatif memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban. Meskipun demikian, upaya optimalisasi pemanfaatan serta penguatan kapasitas sumber daya yang dimiliki, baik dari aspek sumber daya manusia (SDM), alokasi anggaran, ketersediaan sarana dan prasarana, maupun pemanfaatan teknologi informasi, menjadi agenda strategis yang perlu terus didorong dalam kerangka pembangunan jangka menengah lima tahunan sebagaimana telah diatur dan dijabarkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini.

c. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan

Pelaksanaan pelayanan publik oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar selama periode 2021–2024 menunjukkan kinerja yang cukup progresif, baik dari segi peningkatan aksesibilitas layanan, efisiensi proses, maupun kepuasan masyarakat sebagai penerima manfaat. Evaluasi terhadap kinerja pelayanan ini dilakukan secara menyeluruh dengan mengacu pada sejumlah indikator kunci, seperti kecepatan respons, ketepatan sasaran, kemudahan akses, dan tingkat kepuasan pengguna layanan. Indikator-indikator tersebut mencerminkan kualitas responsivitas dan efektivitas pelaksanaan layanan publik yang telah berjalan.

Capaian kinerja yang diperoleh selama periode tersebut menjadi landasan penting dalam penyusunan strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan publik pada periode perencanaan 2025–2030. Strategi yang dirumuskan ke depan diharapkan dapat lebih adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat, memperkuat sistem layanan berbasis digital, serta menjamin pelayanan yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kinerja pelayanan dinas diukur melalui beberapa indikator utama yang berfungsi sebagai tolok ukur dalam menilai efektivitas, efisiensi, dan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Indikator-indikator ini dirancang untuk mencerminkan sejauh mana pelayanan publik mampu memenuhi standar yang telah ditetapkan serta merespons kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Adapun indikator utama tersebut antara lain sebagai berikut : (halaman berikut)

Tabel 2.c

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2024**

No.	Indikator Kinerja Pelayanan	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Persentase Koperasi yang mendapatkan izin usaha simpan pinjam	18,23%	18,23%	18,23%	18,23%	18,23%	18,23%	18,23%	18,23%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase koperasi sehat	59%	18,37%	19,70%	16,89%	59%	18,37%	19,70%	16,89%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Koperasi KSP/USP yang sehat	11,1%	11,1%	81,82%	100%	11,1%	11,1%	81,82%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Pengurus Koperasi yang mendapatkan pendidikan keterampilan	10,31%	24,15%	17,27%	20,19%	10,31%	24,15%	17,27%	20,19%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Koperasi yang Diberdayakan dan mendapatkan perlindungan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase UMKM yang Diberdayakan	53,2%	54,63%	55,00%	83,12%	53,2%	54,63%	55,00%	83,12%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase UMKM yang ditingkatkan kapasitasnya	44,73%	45,67%	46,20%	69,82%	44,73%	45,67%	46,20%	69,82%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase Izin Usaha Sektor Perdagangan yang diterbitkan	23,28%	100%	100%	100%	23,28%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Persentase ketersediaan sarana prasarana perdagangan	95%	100%	100%	100%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase jenis komoditi yang dipantau	20,58%	20,58%	68,42%	86,00%	20,58%	20,58%	68,42%	86,00%	100%	100%	100%	100%

No.	Indikator Kinerja Pelayanan	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	Persentase peningkatan jumlah komoditi ekspor	20,58%	20,58%	20,58%	66,60%	20,58%	20,58%	20,58%	66,60%	100%	100%	100%	100%
12	Persentase alat ukur yang ditera	25,28	30,21	38,46	75,20	25,28	30,21	38,46	75,20	100%	100%	100%	100%
13	Persentase produk lokal yang dipasarkan	30%	30%	30%	100%	30%	30%	30%	100%	100%	100%	100%	100%

d. Kelompok Sasaran Pelayanan

Kelompok sasaran pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disdag.KUKM) Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung menerima manfaat dari program, kegiatan, dan layanan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Penetapan kelompok sasaran ini dilakukan dengan mempertimbangkan mandat kelembagaan, lingkup kewenangan, serta kebutuhan dan potensi yang berkembang di masyarakat.

Secara umum, kelompok sasaran pelayanan Disdag.KUKM pada periode 2021–2024 mencakup :

Tabel 2.d
Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Kelompok Sasaran	Jenis Layanan / Intervensi
1.	Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	• Pelatihan dan pendampingan usaha • Fasilitasi perizinan usaha • Akses pembiayaan dan bantuan modal • Promosi dan pemasaran produk • Digitalisasi UMKM
2.	Koperasi	• Pembinaan kelembagaan koperasi • Fasilitasi RAT dan pelaporan • Pelatihan manajemen dan tata kelola • Pengawasan koperasi aktif
3.	Pedagang (pasar rakyat, kaki lima, toko kecil)	• Penataan dan pengelolaan pasar rakyat • Fasilitasi perizinan usaha • Pembinaan pedagang • Perlindungan Konsumen berupa Tera Metrologi Legal • Pemantauan Harga Komoditas
4.	Masyarakat Umum	• Pasar murah • Pengawasan barang beredar • Edukasi perlindungan konsumen • Informasi harga kebutuhan pokok
5.	Calon Wirausaha Baru (termasuk pelajar/ mahasiswa)	• Program pelatihan kewirausahaan • Inkubasi bisnis pemula • Pengenalan dunia usaha dan motivasi wirausaha • Kemitraan usaha dan akses jejaring pasar

e. Mitra Perangkat Daerah

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta memperluas jangkauan pelayanan publik, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disdag.KUKM) Kabupaten Kepulauan Selayar menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak, baik dari unsur pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat. Kemitraan ini bersifat kolaboratif dan saling mendukung, khususnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan sektor perdagangan, koperasi, dan UMKM.

Mitra perangkat daerah memiliki peran penting dalam memperkuat kapasitas kelembagaan, penyediaan sumber daya, fasilitasi regulasi, dan percepatan pencapaian target pembangunan daerah. Bentuk kemitraan dapat berupa koordinasi, kolaborasi program, dukungan pendanaan, penyediaan data dan informasi, serta pelibatan dalam forum-forum perencanaan dan evaluasi pembangunan.

Berikut adalah daftar mitra strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar selama periode 2021–2024 :

Tabel 2.e
Mitra Strategi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Nama Mitra	Kategori	Ruang Lingkup Kemitraan
1.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Perangkat Daerah	Sinkronisasi layanan perizinan usaha, pendampingan perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA)
2.	Dinas Perindustrian, Perdagangan Provinsi Sulsel	Pemerintah Provinsi	Koordinasi kebijakan perdagangan, fasilitasi promosi produk daerah, dan pelatihan sektor industri kecil
3.	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel	Pemerintah Provinsi	Penguatan koperasi dan UMKM, pelatihan manajerial, bantuan sarana produksi
4.	Kementerian Perdagangan RI	Pemerintah Pusat	Kebijakan harga, pengawasan barang beredar, stabilisasi pasokan kebutuhan pokok
5.	Kementerian Koperasi dan UKM RI	Pemerintah Pusat	Pendampingan koperasi modern, pengembangan wirausaha baru, program bantuan pemerintah

6.	Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Lembaga Keuangan Negara	Edukasi literasi keuangan, digitalisasi UMKM, fasilitasi akses pembiayaan
7.	BPJS Ketenagakerjaan	Pemerintah	Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
8.	Asosiasi Pelaku Usaha dan Koperasi	Organisasi Non-Pemerintah	Advokasi kebijakan, pelatihan anggota koperasi, pengembangan jaringan pasar
9.	Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (SMK, Perguruan Tinggi)	Dunia Pendidikan	Pendidikan kewirausahaan, pelatihan vokasional, magang usaha dan inkubasi bisnis
10.	Media Massa dan Platform Digital	Swasta/Media	Diseminasi informasi program/kegiatan, promosi produk UMKM, edukasi konsumen

f. Dukungan BUMD

Dalam rangka mendukung pencapaian target dan kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar, peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi sangat strategis. BUMD berfungsi sebagai mitra pelaksana dalam pengelolaan sektor perdagangan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui berbagai kegiatan usaha yang mampu memberikan kontribusi positif terhadap penguatan ekonomi daerah.

Selama periode 2021–2024, BUMD Kabupaten Kepulauan Selayar memberikan dukungan melalui penyediaan sarana dan prasarana perdagangan, pengelolaan pasar tradisional, serta pelaksanaan program-program pembinaan UMKM yang terintegrasi dengan kebijakan dinas. Selain itu, BUMD turut berperan dalam penguatan distribusi produk lokal dan pengembangan jejaring pasar untuk memperluas akses pelaku usaha ke pasar yang lebih luas.

Dukungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga mencakup penyediaan berbagai fasilitas pembiayaan serta pengembangan kemitraan strategis yang secara langsung membantu para pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dalam mengatasi berbagai kendala terkait permodalan dan akses pasar. Ke depan, sinergi yang lebih intensif dan terarah antara Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan BUMD akan terus diperkuat dan dikembangkan sebagai bagian dari upaya percepatan pencapaian target-target pembangunan di sektor perdagangan serta pemberdayaan UMKM di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.

g. Kerja Sama Daerah

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar memandang kerja sama lintas daerah sebagai strategi penting dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan serta memperkuat pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Kerja sama ini mencakup pertukaran informasi, koordinasi program, serta pelaksanaan kegiatan bersama dengan pemerintah daerah lain di tingkat provinsi maupun nasional, dalam rangka mengintegrasikan potensi dan sumber daya secara lebih optimal.

Arah kerja sama antar daerah difokuskan pada penguatan kapasitas kelembagaan koperasi dan UMKM, pengembangan pasar bersama antardaerah, serta penerapan inovasi teknologi untuk mempercepat digitalisasi usaha. Di samping itu, kerja sama juga meliputi penyusunan dan harmonisasi kebijakan bersama terkait penataan sistem perdagangan dan upaya stabilisasi harga komoditas strategis.

Selama periode 2021–2024, Dinas telah menjalin sejumlah perjanjian kerja sama dengan beberapa pemerintah daerah tetangga serta instansi terkait. Inisiatif ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya lintas wilayah dan peningkatan daya saing pelaku usaha lokal, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah.

2.1 Permasalahan dan isu strategis

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar, terdapat berbagai permasalahan yang bersifat internal maupun eksternal, yang menjadi hambatan dalam upaya pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah. Permasalahan tersebut mencakup antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi, rendahnya daya saing produk lokal, serta masih terbatasnya akses pasar bagi pelaku UMKM. Di sisi lain, kompleksitas regulasi, fluktuasi harga komoditas, dan ketergantungan pada kondisi geografis kepulauan turut menambah tantangan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan di sektor perdagangan, koperasi, dan UMKM.

Selain itu, terdapat sejumlah isu strategis yang perlu mendapat perhatian serius dalam perumusan arah kebijakan ke depan, seperti perlunya penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan, peningkatan kualitas layanan publik, transformasi digital UMKM, serta penyesuaian terhadap dinamika ekonomi regional dan nasional. Pemahaman yang menyeluruh terhadap permasalahan dan isu-isu strategis ini menjadi kunci

penting dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan yang lebih efektif, responsif, dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang tepat, tantangan yang ada dapat diubah menjadi peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan berdaya saing.

a. Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar, terdapat sejumlah permasalahan mendasar yang selama ini menjadi kendala signifikan dalam optimalisasi pelayanan publik serta pencapaian target pembangunan sektor perdagangan, koperasi, dan UMKM. Permasalahan tersebut harus mendapat perhatian serius agar program dan kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pengembangan ekonomi daerah.

Beberapa permasalahan utama yang dihadapi meliputi :

- Produk Unggulan Daerah : Akses pasar dan promosi produk unggulan, seperti kelapa dan ikan olahan, masih belum optimal. Hal ini mengakibatkan daya saing produk lokal di pasar regional maupun nasional masih relatif rendah dan belum mampu bersaing secara maksimal di pasar global.
- UMKM : Terbatasnya akses permodalan serta pendampingan usaha menjadi hambatan serius dalam pengembangan UMKM yang berbasis pada potensi dan sumber daya lokal. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan dan transformasi UMKM menjadi kurang optimal, terutama dalam menghadapi persaingan dan perkembangan pasar yang semakin dinamis.
- Koperasi : Masih banyak koperasi yang belum aktif dan belum melakukan modernisasi sesuai dengan prinsip kelembagaan ekonomi rakyat yang sehat dan adaptif. Rendahnya literasi dan kompetensi pengurus koperasi menjadi penyebab utama kurangnya produktivitas dan daya saing koperasi di tingkat lokal.
- Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaku Usaha : Kompetensi dan keterampilan SDM pelaku usaha masih berada pada tingkat yang rendah. Selain itu, keterbatasan lembaga pelatihan yang memadai untuk pengembangan kapasitas menjadi faktor penghambat utama dalam meningkatkan kualitas dan daya saing pelaku usaha.
- Pasar Lokal dan Sektor Pariwisata : Pasar tradisional yang ada belum tertata secara baik dan kurang mendukung pengembangan sektor pariwisata. Kondisi ini mengurangi potensi pasar tradisional sebagai simpul ekonomi lokal yang sekaligus dapat menjadi daya tarik wisatawan.

b. Isu Strategis

Dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan yang terus berkembang, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar mengidentifikasi beberapa isu strategis yang menjadi fokus utama dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan jangka menengah hingga panjang. Isu-isu ini mencerminkan tantangan dan peluang yang berkaitan dengan potensi daerah dan kondisi lingkungan yang relevan secara global, nasional, dan regional.

- **Peningkatan Daya Saing dan Perluasan Akses Pasar Produk Unggulan** : Optimalisasi akses pasar dan promosi produk unggulan daerah, seperti kelapa dan ikan olahan, sangat penting untuk mengatasi ketimpangan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing produk lokal secara berkelanjutan di tingkat regional dan global.
- **Penguatan Ekosistem UMKM Berbasis Sumber Daya Lokal** : Meningkatkan akses pembiayaan, pendampingan usaha, serta kemitraan strategis secara berkelanjutan menjadi langkah utama dalam mendukung percepatan transformasi digital dan akselerasi UMKM naik kelas.
- **Revitalisasi dan Transformasi Koperasi** : Mengaktifkan koperasi yang belum produktif dengan menerapkan prinsip modernisasi dan berbasis komunitas guna memperkuat kelembagaan ekonomi rakyat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam aktivitas koperasi.
- **Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi SDM Pelaku Usaha** : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaku usaha melalui pelatihan, sertifikasi, dan transformasi digital guna memenuhi tuntutan keterampilan global dan mendukung daya saing usaha di era digital.
- **Modernisasi dan Penataan Pasar Tradisional** : Menata dan memodernisasi pasar tradisional sebagai simpul ekonomi lokal yang mendukung sektor pariwisata serta memaksimalkan pemanfaatan ruang dan fasilitas publik sesuai dengan program revitalisasi pasar rakyat.

c. Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan

Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki berbagai potensi unggulan yang menjadi modal utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui kewenangan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Potensi ini meliputi beberapa aspek strategis yang mendukung pengembangan sektor perdagangan dan kewirausahaan lokal.

Pertama, produk unggulan daerah seperti kelapa dan ikan olahan merupakan komoditas utama yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Pengembangan produk ini melalui pemberdayaan pelaku usaha dan inovasi produk menjadi fokus strategis dalam meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk lokal di pasar regional maupun nasional.

Kedua, keberadaan UMKM berbasis sumber daya lokal memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian masyarakat. Dinas memiliki kewenangan untuk memberikan fasilitasi berupa pelatihan, pendampingan, dan akses permodalan bagi UMKM agar mampu mengembangkan usaha secara berkelanjutan dan mandiri. Selain itu, potensi koperasi aktif dan berbasis komunitas menjadi kekuatan ekonomi kolektif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penguatan koperasi melalui pembinaan kelembagaan, peningkatan kapasitas manajemen, serta akses pasar dan permodalan menjadi prioritas dalam strategi pengembangan koperasi.

Lokasi Kabupaten Kepulauan Selayar yang memiliki pelabuhan strategis dan konektivitas antar pulau menjadi peluang besar untuk mengoptimalkan aktivitas perdagangan dan distribusi barang. Kewenangan dalam mengelola sarana perdagangan dan infrastruktur pelabuhan lokal sangat penting untuk menunjang efisiensi logistik dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Sumber daya manusia di sektor usaha yang cukup banyak dan potensial menjadi aset utama dalam pengembangan perdagangan dan kewirausahaan. Dinas berperan aktif dalam peningkatan kompetensi pelaku usaha melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan kapasitas, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha lokal.

Terakhir, potensi pasar lokal dan pengembangan pariwisata daerah merupakan peluang untuk memperluas pasar bagi produk lokal serta meningkatkan perputaran ekonomi di tingkat daerah. Sinergi antara pengembangan pasar dan sektor pariwisata diharapkan dapat menjadi penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dengan mengoptimalkan seluruh potensi daerah yang ada, sesuai dengan kewenangan dan tugas Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar, diharapkan dapat terwujud pengembangan ekonomi yang bersifat inklusif, berkelanjutan, dan mampu memberikan dampak positif secara langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui sinergi program pemberdayaan UMKM, penguatan koperasi, pengelolaan produk unggulan daerah, serta pemanfaatan lokasi strategis pelabuhan

dan konektivitas antar pulau, diharapkan sektor perdagangan dan kewirausahaan lokal dapat tumbuh pesat, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.

d. Tantangan dan Peluang Pengembangan

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah perlu memahami secara menyeluruh berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, analisis terhadap kondisi internal dan eksternal organisasi menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dari proses penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra).

Melalui pendekatan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), dinas dapat mengidentifikasi secara objektif kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dari sisi internal, serta mengenali peluang dan tantangan dari lingkungan eksternal yang memengaruhi pengembangan pelayanan. Hasil analisis ini memberikan gambaran nyata mengenai kondisi aktual dinas, yang selanjutnya menjadi dasar dalam merumuskan strategi pengembangan pelayanan yang tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan.

Tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengembangan sektor perdagangan, koperasi, dan UMKM tidak hanya berkaitan dengan faktor teknis, tetapi juga menyangkut dinamika regulasi, kemajuan teknologi, dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Oleh karena itu, analisis SWOT disusun secara terpisah untuk masing-masing sektor sebagai upaya mendalam dalam memahami karakteristik, potensi, dan hambatan spesifik yang dihadapi, sehingga dapat dirumuskan strategi yang lebih terarah dan implementatif.

1. Analisis SWOT Sektor Perdagangan

a. Strengths (Kekuatan)

- Adanya jaringan pasar rakyat yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk wilayah kepulauan.
- Regulasi daerah yang mendukung penataan dan pengembangan sektor perdagangan.
- Dukungan kelembagaan perangkat daerah dengan struktur bidang perdagangan yang khusus menangani perizinan dan pembinaan pelaku usaha.
- Kegiatan pasar murah rutin untuk menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok.

- Potensi sektor perdagangan antar pulau yang tinggi, terutama komoditas hasil pertanian dan perikanan.
- b. Weaknesses (Kelemahan)
- Sarana dan prasarana pasar tradisional masih belum memadai dan banyak yang memerlukan revitalisasi.
 - Masih rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi, terutama dalam hal perizinan dan penataan usaha.
 - Keterbatasan sistem digital dalam pemantauan harga, distribusi, dan pengawasan barang.
 - Keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan pembinaan teknis dan pengawasan langsung terhadap pelaku usaha.
 - Kurangnya data perdagangan yang akurat dan terintegrasi untuk pengambilan keputusan strategis.
- c. Opportunities (Peluang)
- Kemajuan teknologi informasi memungkinkan pengembangan sistem perdagangan berbasis digital dan e-commerce lokal.
 - Dukungan pemerintah pusat melalui program revitalisasi pasar dan penguatan perdagangan dalam negeri.
 - Potensi kerja sama dagang dengan daerah lain dan sektor swasta dalam distribusi komoditas unggulan.
 - Masuknya investasi toko modern yang dapat diarahkan untuk bermitra dengan pelaku UMKM lokal.
- d. Threats (Ancaman)
- Persaingan tidak seimbang antara pelaku usaha tradisional dengan toko modern dan platform dagang besar.
 - Fluktuasi harga bahan pokok akibat ketergantungan pada pasokan dari luar daerah.
 - Ketidakstabilan distribusi logistik akibat faktor cuaca dan geografis di wilayah kepulauan.
 - Rendahnya literasi konsumen terhadap hak dan kewajiban dalam perdagangan.
2. Analisis SWOT Sektor Koperasi dan UKM
- a. Strengths (Kekuatan)
- Terdapat koperasi aktif yang memiliki basis anggota di berbagai sektor ekonomi masyarakat.
 - Adanya kelompok UMKM yang tersebar di berbagai kecamatan dengan potensi produk lokal yang beragam.
 - Struktur kelembagaan dinas yang mendukung pembinaan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM secara langsung.

- Program pelatihan dan pendampingan rutin bagi pelaku UMKM.
 - Dukungan legalitas kelembagaan melalui pengesahan akta koperasi dan izin usaha mikro.
- b. Weaknesses (Kelemahan)
- Masih banyak koperasi tidak aktif atau bermasalah karena lemahnya tata kelola dan partisipasi anggota.
 - Rendahnya literasi digital, keuangan, dan manajerial pelaku UMKM dan pengurus koperasi.
 - Terbatasnya akses pelaku UMKM ke sumber pembiayaan formal.
 - Kurangnya inovasi produk dan kesulitan dalam penetrasi pasar luar daerah.
 - Ketergantungan koperasi terhadap sektor konsumsi, belum banyak koperasi produksi yang tumbuh signifikan.
- c. Opportunities (Peluang)
- Dukungan pemerintah pusat dan provinsi dalam bentuk bantuan modal, pelatihan, dan program Kredit Usaha Rakyat (KUR)..
 - Digitalisasi usaha dan sistem koperasi berbasis aplikasi yang mulai dikembangkan secara nasional.
 - Potensi produk unggulan lokal seperti hasil laut, olahan pangan, dan kerajinan yang bisa dikembangkan untuk pasar ekspor.
 - Peluang kemitraan dengan platform e-commerce, lembaga pendidikan, dan perusahaan besar dalam program CSR.
 - Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berwirausaha.
- d. Threats (Ancaman)
- Masuknya produk luar daerah dengan harga murah yang mengancam daya saing UMKM lokal.
 - Ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan terhadap produk UMKM di pasar lokal.
 - Koperasi yang tidak profesional berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap gerakan koperasi secara umum.
 - Tingginya ketergantungan terhadap bantuan pemerintah yang dapat melemahkan kemandirian usaha.

Tabel 2.1**Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan dengan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan			Rumusan Isu Strategis
			Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Produk unggulan daerah (Kelapa, ikan olahan)	Akses pasar dan promosi belum optimal	Ketimpangan pertumbuhan ekonomi lokal dan potensi eksploitasi SDA	Persaingan produk unggulan di pasar global	Penguatan ekonomi kerakyatan dan hilirisasi produk lokal	Rendahnya daya saing antar daerah	Perlunya peningkatan daya saing dan perluasan akses pasar produk unggulan lokal yang berbasis potensi daerah dan berkelanjutan
UMKM berbasis sumber daya lokal	Terbatasnya akses permodalan dan pendampingan usaha	Ketimpangan sosial ekonomi dan keterbatasan pemberdayaan usaha kecil	Percepatan transformasi digital pelaku UMKM	Akselerasi UMKM naik kelas melalui pembiayaan dan pelatihan	Terbatasnya jaringan kemitraan usaha daerah	Penguatan ekosistem UMKM melalui peningkatan akses pembiayaan, pendampingan usaha, dan kemitraan strategis secara berkelanjutan
Potensi koperasi aktif dan berbasis komunitas	Banyak koperasi tidak aktif dan belum mengikuti prinsip modernisasi	Lemahnya kelembagaan ekonomi rakyat dan rendahnya partisipasi komunitas	Tren kolaborasi ekonomi komunitas dan koperasi digital	Transformasi kelembagaan koperasi menjadi modern, produktif, dan adaptif	Minimnya koperasi produktif di tingkat lokal	Revitalisasi dan transformasi koperasi menjadi lembaga ekonomi rakyat yang modern, sehat, dan berdaya saing
Lokasi strategis pelabuhan dan konektivitas antar pulau	Distribusi barang kebutuhan pokok belum efisien dan stabil	Ketahanan logistik wilayah kepulauan serta tekanan terhadap lingkungan laut	Disrupsi rantai pasok global dan fluktuasi harga	Stabilitas harga pangan dan penguatan logistik nasional	Ketergantungan antarwilayah dan disparitas distribusi	Penguatan sistem distribusi barang kebutuhan pokok yang terintegrasi, efisien, dan berbasis pada karakteristik wilayah kepulauan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan dengan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan			Rumusan Isu Strategis
			Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	
1	2	3	4	5	6	7
SDM pelaku usaha yang cukup banyak (potensi)	Rendahnya kompetensi dan keterampilan pelaku usaha	Kesenjangan kapasitas SDM dan rendahnya literasi wirausaha	Tuntutan kompetensi global dan digitalisasi usaha	Peningkatan kualitas SDM UMKM melalui pelatihan dan sertifikasi	Terbatasnya akses terhadap pelatihan dan pengembangan kapasitas	Penguatan kapasitas dan kompetensi SDM pelaku usaha melalui pelatihan, sertifikasi, dan transformasi digital
Potensi pasar lokal dan wisata daerah	Pasar tradisional belum tertata dengan baik dan kurang mendukung sektor wisata	Pemanfaatan ruang dan fasilitas publik belum optimal	Perubahan pola konsumsi dan berkembangnya e-commerce	Program nasional revitalisasi pasar rakyat	Kesenjangan infrastruktur pasar antarwilayah	Modernisasi dan penataan pasar tradisional sebagai simpul ekonomi lokal yang terintegrasi dengan sektor pariwisata

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menyajikan arah strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk kurun waktu lima tahun ke depan. Penyusunan bab ini merupakan bagian integral dari dokumen perencanaan strategis yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengarahkan seluruh aktivitas dan program kerja dinas agar selaras dengan tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh. Melalui bab ini, dijelaskan bagaimana visi, misi, serta fungsi dinas diselaraskan dengan target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, sehingga arah kebijakan yang dirumuskan dapat memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kinerja, efektivitas pelayanan, serta pemberdayaan usaha kecil dan menengah di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dalam penyusunannya, bagian ini dirancang dengan pendekatan yang sistematis dan terintegrasi, dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan ekonomi daerah, arah kebijakan nasional dan daerah yang relevan, serta isu-isu strategis di sektor perdagangan, koperasi, dan UMKM. Pendekatan ini memastikan bahwa perencanaan strategis tidak hanya berorientasi pada pencapaian target jangka pendek, tetapi juga mendukung kesinambungan pembangunan jangka menengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Selain itu, proses perumusan strategi juga melibatkan analisis terhadap potensi daerah, kebutuhan masyarakat, serta tantangan yang dihadapi di tingkat lokal. Oleh karena itu, bagian ini menjadi landasan penting dalam merumuskan program prioritas dan kegiatan operasional yang terukur, realistis, adaptif terhadap perubahan, serta dapat dievaluasi secara berkala, sehingga mampu mendorong pencapaian sasaran pembangunan daerah secara optimal, terarah, dan berkelanjutan.

Ruang lingkup pembahasan dalam bab ini dibagi ke dalam lima bagian utama yang secara terstruktur membahas berbagai elemen penting dalam perencanaan strategis perangkat daerah. Kelima bagian tersebut mencakup analisis situasi dan kondisi terkini sebagai dasar perumusan strategi, penetapan tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai, formulasi strategi serta arah kebijakan yang menjadi panduan dalam pelaksanaan program, serta pengaturan langkah-langkah konkret yang mendukung pencapaian sasaran tersebut. Dengan demikian, bab ini tidak hanya menyajikan gambaran konseptual, tetapi juga memberikan arahan yang jelas dan terukur dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah yang efektif dan berdaya saing. Adapun ruang lingkup pembahasan dalam bab ini meliputi lima bagian utama, yaitu :

3.1 Konsep Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Bab ini menyajikan penjabaran sistematis mengenai tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk periode lima tahun ke depan. Dokumen ini merupakan bagian integral dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar, serta menjadi pedoman strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sektor perdagangan, koperasi, dan UMKM.

Perumusan elemen-elemen perencanaan dalam Renstra ini bertujuan untuk memperjelas arah pembangunan yang menjadi kewenangan Disdag.KUKM, sekaligus menjamin adanya keterkaitan logis dan konsistensi vertikal antara dokumen perencanaan strategis perangkat daerah dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD.

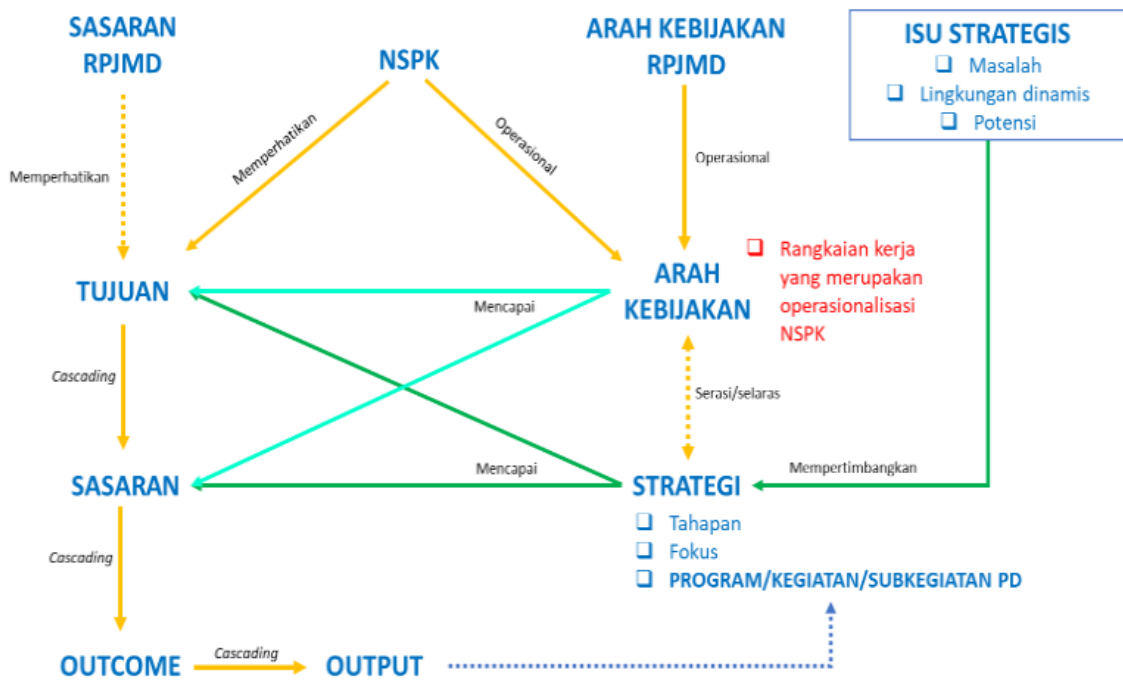
Secara metodologis, perumusan tujuan dan sasaran dilakukan berdasarkan analisis terhadap permasalahan dan isu strategis yang berkembang, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Selain itu, perumusan Renstra ini juga memperhatikan keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, seperti RPJMN, Renstra Kementerian/Lembaga terkait, serta RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, guna menjaga kesinambungan kebijakan dan sinergi antar level pemerintahan.

Dalam struktur Renstra ini :

- **Tujuan** merupakan rumusan umum mengenai hal-hal yang ingin dicapai dalam jangka menengah oleh DPKUKM.
- **Sasaran** adalah penjabaran dari tujuan dalam bentuk yang lebih spesifik, terukur, dan menjadi dasar pengukuran kinerja perangkat daerah.
- **Strategi** merupakan pendekatan atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.
- **Arah kebijakan** menjadi panduan normatif dalam menentukan fokus kegiatan, program, dan bentuk intervensi di sektor yang dikelola.

Untuk menggambarkan keterkaitan logis antar unsur perencanaan strategis tersebut, berikut ditampilkan diagram konsep perencanaan strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar, yang memvisualisasikan hubungan antara visi dan misi Kepala Daerah dengan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, hingga program dan kegiatan yang akan diimplementasikan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selama periode Renstra :

Gambar 3.1 Konsep Renstra
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Kepulauan Selayar



Sebagaimana tergambar dalam diagram di atas, proses perencanaan strategis dilakukan secara hirarkis dan terstruktur, dimulai dari visi dan misi Kepala Daerah yang kemudian dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran perangkat daerah. Tujuan dan sasaran tersebut selanjutnya dikembangkan menjadi strategi dan arah kebijakan operasional, yang menjadi dasar dalam penyusunan program, kegiatan, dan sub-kegiatan selama lima tahun mendatang. Proses ini disusun untuk memastikan keterpaduan antar level perencanaan, serta relevansi dengan kondisi aktual, potensi daerah, dan kebutuhan masyarakat, dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi kinerja sebelumnya serta keterbatasan sumber daya yang ada.

Melalui pendekatan perencanaan ini, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar diharapkan dapat memainkan peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat struktur ekonomi berbasis kerakyatan, serta menciptakan ekosistem usaha yang mendukung peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing pelaku usaha kecil dan menengah di Kabupaten Kepulauan Selayar. Bab ini menjadi landasan utama bagi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menetapkan prioritas pembangunan sektor yang dikelola, sekaligus sebagai acuan dalam proses evaluasi dan pengukuran kinerja secara periodik.

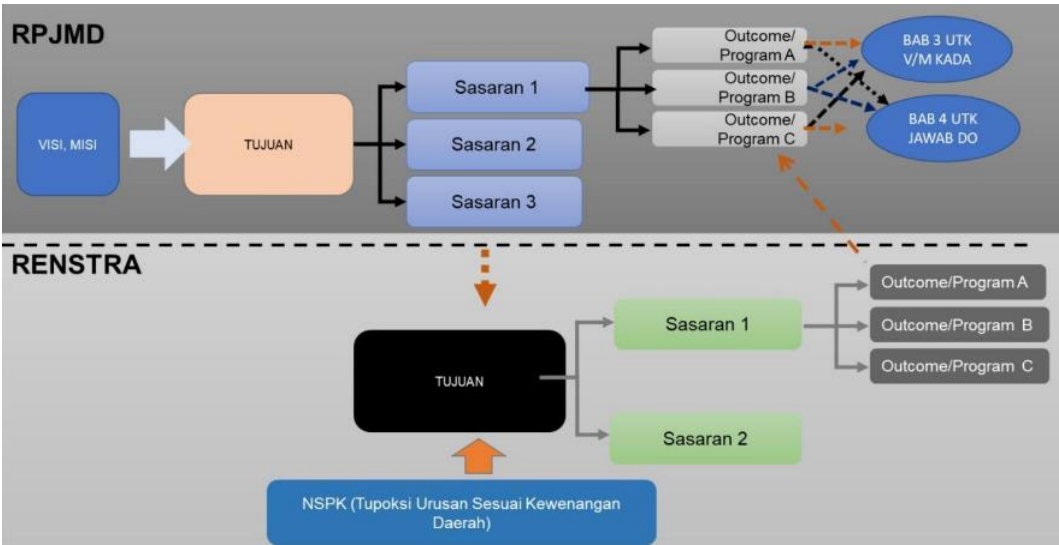
3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Penyusunan tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar tidak disusun secara terpisah, melainkan mengacu langsung pada sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar, guna memastikan keselarasan perencanaan antara perangkat daerah dengan arah pembangunan daerah secara makro.

Dalam konteks ini, tujuan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar disusun sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran RPJMD, terutama dalam aspek penguatan ekonomi daerah berbasis kerakyatan. Tujuan tersebut meliputi pemberdayaan UMKM, pengembangan koperasi modern, peningkatan daya saing sektor perdagangan, serta penciptaan iklim usaha yang sehat, inklusif, dan kompetitif.

Untuk menggambarkan keterkaitan logis antara sasaran RPJMD dan tujuan Renstra, berikut disajikan diagram yang memperlihatkan bagaimana sasaran RPJMD diturunkan ke dalam tujuan strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar, yang selanjutnya dijabarkan lebih rinci ke dalam sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan :

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Dinas Disdag.KUKM Kabupaten Kepulauan Selayar



Melalui diagram tersebut dapat dilihat bahwa setiap sasaran RPJMD yang relevan telah dipetakan secara sistematis ke dalam tujuan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal ini menjamin konsistensi dan sinergi antar dokumen perencanaan, serta memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang direncanakan memiliki landasan yang kuat dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Dengan adanya kerangka ini, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar dapat merancang program dan kegiatan yang lebih fokus, terarah, serta mampu dipertanggungjawabkan, guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing.

3.3 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan daya saing sektor perdagangan, penguatan kelembagaan koperasi, serta pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan arah kebijakan yang terstruktur dan sistematis, yang mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan di bidang perdagangan, koperasi, dan UMKM secara adaptif dan berkelanjutan.

Penyusunan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan dalam Rencana Strategis ini diselaraskan dengan kebijakan nasional, provinsi, dan daerah, serta mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang berkembang di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar. Dengan pendekatan perencanaan yang berbasis kinerja dan berorientasi pada hasil, dokumen ini menjadi acuan dalam perumusan program dan kegiatan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya pelaku usaha ekonomi lokal.

Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar dirumuskan sebagai berikut, yaitu :

a. Tujuan

Tujuan merupakan rumusan umum yang menggambarkan capaian strategis yang hendak diwujudkan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar selama periode Renstra. Perumusan tujuan ini berlandaskan pada visi dan misi Kepala Daerah serta sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), guna memberikan arah yang jelas dalam pengembangan sektor perdagangan, koperasi, dan usaha kecil menengah. Tujuan tersebut menjadi pedoman utama dalam penyusunan kebijakan, program, serta evaluasi kinerja perangkat daerah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkualitas.

Tujuan Renstra DISDAG.KUKM Kabupaten Kepulauan Selayar 2025-2029 adalah :

Meningkatkan tata kelola birokrasi yang akuntabel serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan koperasi, UMKM, dan IKM yang berdaya saing berbasis teknologi dan potensi lokal

Tujuan tersebut dirumuskan berdasarkan prinsip :

- Menggambarkan kondisi yang diharapkan dalam lima tahun ke depan;
- Terukur dan dapat dievaluasi secara periodik;
- Memiliki bahasa yang jelas dan mudah dipahami;
- Mewakili intermediate outcome sesuai tugas dan fungsi Disdag. KUKM.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, ditetapkan sasaran-sasaran strategis berikut yang mewakili berbagai urusan yang menjadi tanggung jawab :

- 1) Meningkatkan kapasitas kelembagaan koperasi dan pelaku UMKM dalam pengembangan produk dan pemasaran.
- 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan perdagangan yang efisien dan transparan.
- 3) Meningkatkan akses pembiayaan dan pendampingan usaha bagi pelaku UMKM.
- 4) Mengembangkan sistem informasi perdagangan dan koperasi berbasis teknologi digital.
- 5) Meningkatkan perlindungan konsumen dan pengawasan pasar untuk menjaga stabilitas harga dan kualitas produk.

b. Sasaran

Sasaran merupakan pernyataan yang lebih spesifik dan terukur yang diturunkan dari tujuan strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam periode Renstra 2025-2029. Sasaran disusun sebagai tolok ukur pencapaian tujuan yang dapat dievaluasi secara berkala dan menjadi pedoman utama dalam perencanaan program serta kegiatan perangkat daerah. Selain itu, sasaran mencerminkan fokus prioritas pembangunan sektor perdagangan, koperasi, dan UMKM yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas, serta menjawab kebutuhan dan tantangan yang dihadapi dalam konteks pembangunan daerah yang dinamis.

Dengan demikian, sasaran berperan sebagai indikator keberhasilan yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan dalam

mendukung terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah serta pencapaian sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sasaran strategis yang dirumuskan dalam Renstra DISDAG.KUKM Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 meliputi :

- 1) Meningkatkan penyelenggaraan perangkat daerah yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik berbasis teknologi informasi;
- 2) Mengembangkan sistem perdagangan yang mendukung hilirisasi dan meningkatkan stabilitas harga serta ketersediaan barang pokok yang efisien dan terjangkau;
- 3) Meningkatkan kontribusi koperasi terhadap perekonomian desa melalui integrasi dalam rantai pasok dan jaringan pasar berbasis digitalisasi;
- 4) Meningkatkan kapasitas produksi, kualitas, dan akses pasar industri pengolahan berbasis sumber daya alam lokal yang berorientasi ekspor;
- 5) Meningkatkan perlindungan konsumen dan pengawasan pasar guna menjaga stabilitas harga dan kualitas produk.

Sasaran tersebut dirumuskan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- Memiliki ukuran yang jelas dan dapat diukur secara periodik melalui indikator kinerja yang relevan;
- Berorientasi pada hasil konkret yang dapat dicapai dalam jangka waktu Renstra lima tahun;
- Sesuai dan mendukung peran serta fungsi strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Mampu menjawab isu strategis dan kebutuhan pembangunan daerah yang terus berkembang.

c. Strategi

Strategi merupakan pendekatan dan langkah-langkah sistematis yang akan ditempuh oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra periode 2025-2029. Strategi ini dirancang dengan mempertimbangkan kondisi internal organisasi, potensi daerah, sumber daya yang tersedia, serta dinamika eksternal yang meliputi tantangan dan peluang pembangunan di tingkat lokal, nasional, dan global.

Perumusan strategi berfungsi sebagai kerangka kerja yang menghubungkan perencanaan kebijakan dengan pelaksanaan program dan kegiatan secara efektif dan efisien. Strategi yang diambil diarahkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, mendorong inovasi teknologi, meningkatkan daya saing produk koperasi dan UMKM, serta membangun ekosistem perdagangan yang kondusif dan berkelanjutan.

Strategi-strategi utama yang akan dijalankan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar meliputi :

1. Meningkatkan tata kelola birokrasi yang akuntabel, transparan, dan partisipatif melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik;
2. Memperkuat kelembagaan koperasi dan UMKM dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta akses pembiayaan dan pemasaran;
3. Mengembangkan sistem perdagangan yang berbasis digital dan mendukung stabilitas harga serta ketersediaan barang pokok;
4. Mendorong pengembangan industri pengolahan berbasis sumber daya alam lokal yang memiliki nilai tambah dan orientasi ekspor;
5. Meningkatkan perlindungan konsumen dan pengawasan pasar guna menjaga kualitas produk dan kepercayaan masyarakat.

d. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan pedoman normatif yang memberikan fokus dan prioritas intervensi pembangunan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan program dan kegiatan selama periode Renstra 2025-2029. Arah kebijakan ini menetapkan bidang-bidang utama yang menjadi fokus pembangunan, sekaligus menjadi acuan bagi seluruh stakeholder dalam mendukung pelaksanaan visi, misi, dan tujuan perangkat daerah.

Penetapan arah kebijakan diselaraskan dengan kebijakan nasional dan provinsi, serta disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan daerah guna memastikan keberlanjutan, efektivitas, dan sinergi pembangunan. Arah kebijakan ini mencakup aspek kelembagaan, pengembangan produk dan pasar, peningkatan daya saing, pemanfaatan teknologi, serta perlindungan konsumen.

Adapun arah kebijakan strategis yang diambil meliputi :

1. Peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan akses layanan;
2. Pengembangan sistem perdagangan yang efisien dan stabil dengan dukungan digitalisasi dan pengawasan pasar yang ketat;
3. Pemberdayaan koperasi dan UMKM melalui peningkatan legalitas, akses pembiayaan, pendampingan teknis, dan fasilitasi perluasan pasar;
4. Mendorong pengembangan industri pengolahan berbasis sumber daya alam lokal yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah dan ekspor;
5. Penguatan perlindungan konsumen melalui regulasi, edukasi, dan pengawasan yang efektif guna menjaga kualitas produk dan kepuasan masyarakat.

Tabel tujuan dan sasaran dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 menyajikan ringkasan terstruktur mengenai hasil-hasil yang ingin dicapai selama periode perencanaan. Tabel ini tidak hanya memuat pernyataan tujuan dan sasaran strategis, tetapi juga mengintegrasikan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan pencapaian, target-target tahunan, serta keterkaitan dengan kebijakan nasional dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang relevan.

Penyusunan tabel ini didasarkan pada analisis mendalam terhadap tantangan pembangunan daerah, kebutuhan pelaku usaha kecil dan menengah, serta upaya peningkatan daya saing sektor perdagangan dan koperasi di Kabupaten Kepulauan Selayar. Dengan adanya tabel ini, seluruh pemangku kepentingan dapat memantau secara sistematis capaian yang diharapkan, memastikan bahwa setiap sasaran dapat diukur secara objektif, serta memperkuat akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah.

Selain itu, tabel ini menjadi instrumen penting dalam proses evaluasi dan pengambilan keputusan selama pelaksanaan Renstra, memungkinkan penyesuaian strategi dan kebijakan yang responsif terhadap dinamika yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, tabel tujuan dan sasaran Renstra menjadi fondasi yang kokoh bagi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan sektor perdagangan, koperasi, dan UMKM yang berorientasi pada peningkatan kualitas dan keberlanjutan ekonomi daerah.

Tabel 3.3

**Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029**

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Peraturan Menteri PAN-RB No. 15 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) : Meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, penguatan birokrasi akuntabel, transparan, dan partisipatif	Mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan mendorong ekonomi lokal yang tangguh melalui penguatan koperasi, UMKM, dan perdagangan berbasis teknologi dan potensi daerah		Indeks transparansi dan partisipasi publik dalam layanan publik	75	80	85	90	95	95	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik digital
		SS.1 Menguatkan tata kelola dan layanan publik berbasis digital yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat	Nilai SAKIP	75	80	85	90	95	95	Menilai efisiensi dan akuntabilitas anggaran serta kinerja organisasi
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Disdag.KUKM	74	75	76	77	78	80	Menilai tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kinerja organisasi
Peraturan Menteri Perdagangan No. 34 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Stabilitas Harga dan Ketersediaan Barang Pokok RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar : Meningkatnya Stabilitas ekonomi makro daerah		SS.2 : Pengembangan sistem perdagangan untuk mendukung hilirisasi serta meningkatkan stabilitas harga barang pokok yang efisien dan terjangkau	Tingkat stabilitas harga bahan pokok (inflasi bahan pokok %) dan ketersediaan stok bahan pokok (hari stok tersedia)	75	80	85	90	95	95	Persentase komoditas kebutuhan pokok yang harganya tetap stabil dalam batas wajar
Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 3 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan		SS.3 : Meningkatkan kontribusi koperasi terhadap perekonomian desa yang terintegrasi	Persentase koperasi dan UMKM yang memiliki legalitas lengkap,	60	70	80	90	100	100	Mengukur persentase koperasi dan UMKM yang memiliki legalitas, sertifikasi, dan akses pasar memadai

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Koperasi dan UMKM Berbasis Digital RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar : Meningkatkan nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri pengolahan		dalam rantai pasok dan jaringan pasar berbasis digitalisasi	sertifikasi, dan akses pasar yang memadai							untuk meningkatkan daya saing
			Persentase peningkatan jumlah koperasi yang memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam (IUSP)	60	70	80	90	100	100	Mengukur kenaikan jumlah koperasi yang memiliki IUSP sebagai legalitas usaha simpan pinjam
			Persentase KSP/USP koperasi yang memiliki predikat "sehat" berdasarkan hasil penilaian resmi	50	55	60	65	70	70	Mengukur persentase koperasi simpan pinjam/usaha simpan pinjam yang sehat menurut penilaian resmi
			Persentase pengelola koperasi yang memiliki sertifikat kompetensi manajerial koperasi	30	40	50	60	70	70	Mengukur persentase pengelola koperasi yang memiliki sertifikat kompetensi manajerial
			Persentase koperasi sektor produksi yang mengalami peningkatan volume usaha pasca pemberdayaan	20	30	40	50	60	60	Mengukur peningkatan volume usaha koperasi sektor produksi setelah pemberdayaan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Persentase UMKM binaan yang naik kelas	2.5	3.00	3,5	4.00	4.5	4.5	Mengukur proporsi UMKM binaan yang meningkat kelas usahanya
			Persentase pertumbuhan jumlah UMKM binaan aktif dibanding tahun Sebelumnya	8	10	12	15	18	18	Mengukur pertumbuhan jumlah UMKM binaan yang aktif dari tahun ke tahun
			Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	70	75	80	85	90	90	Mengukur proporsi UTTP yang memiliki tanda tera sah sesuai standar pengawasan metrologi legal
Peraturan Presiden No. 52 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional 2015-2035 RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar : Percepatan hilirisasi dan industri sumberdaya alam berorientasi ekspor		SS.4 : Meningkatkan kapasitas produksi, kualitas, dan akses pasar industri pengolahan berbasis sumber daya alam lokal yang berorientasi ekspor	Persentase peningkatan nilai tambah produk olahan sumber daya alam (SDA) lokal	5	7	9	11	13	13	Mengukur persentase kenaikan nilai tambah yang dihasilkan dari proses pengolahan dan hilirisasi produk SDA lokal setiap tahun sebagai upaya meningkatkan kualitas dan daya saing produk di pasar domestik maupun ekspor

3.4 Penahapan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Penahapan pembangunan Rencana Strategis (Renstra) disusun secara sistematis dengan pendekatan yang terstruktur dan komprehensif, mengacu pada prioritas tahunan yang telah dirancang untuk mencerminkan sebuah proses tahapan progresif dan berkelanjutan dalam pencapaian tujuan serta sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya. Setiap tahapan penahapan pembangunan ini disusun dengan mempertimbangkan urutan pelaksanaan yang logis, realistis, dan dapat diimplementasikan secara efektif, sehingga proses pencapaian target dapat berjalan secara terarah, terorganisir, dan efisien tanpa mengabaikan dinamika perubahan kondisi internal maupun eksternal yang mungkin terjadi.

Lebih jauh, penahapan Renstra ini tidak semata-mata bersifat proyeksi ke depan (*forward-looking*), melainkan juga bersifat reflektif, dengan berlandaskan pada analisis mendalam terhadap hasil evaluasi capaian selama lima tahun periode sebelumnya. Evaluasi tersebut mencakup keberhasilan yang telah diraih, hambatan atau tantangan yang dihadapi, serta pelajaran penting yang diperoleh selama masa implementasi Renstra sebelumnya, yang menjadi pijakan utama dalam merumuskan langkah-langkah strategis dan perencanaan ke depan yang lebih adaptif dan responsif.

Dengan demikian, penahapan prioritas pembangunan yang dirumuskan ini memastikan bahwa seluruh kebijakan, program, dan kegiatan yang diimplementasikan tidak hanya mampu menjawab tantangan pembangunan yang ada saat ini, tetapi juga memanfaatkan peluang yang tersedia secara optimal, sehingga menghasilkan dampak yang signifikan dan berkelanjutan bagi kemajuan sektor perdagangan, koperasi, serta usaha kecil dan menengah di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Berikut ini disajikan tahapan prioritas pembangunan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk periode tahun 2026 hingga 2030 secara rinci dan terperinci. Penjabaran ini disusun sebagai acuan utama dalam pelaksanaan program serta kegiatan perangkat daerah selama masa perencanaan, sehingga setiap langkah pembangunan dapat berjalan dengan fokus, terarah, dan optimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Untuk memudahkan pemahaman dan monitoring, tahapan prioritas pembangunan tersebut diuraikan dalam bentuk tabel yang dapat ditemukan pada halaman berikutnya.

Tabel 3.4
Penahapan Renstra Dinas Perdagangabn, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026-2030

Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
1	2	3	4	5
Tahapan RPJMD				
Peningkatan Produktivitas Sektor Perekonomian, Infrastruktur Dasar dan Publik	Pembangunan Ekonomi Inklusif & SDM Menuju Kemandirian	Pemantapan Ekonomi & Kapasitas Produksi Sektor Unggulan	Akselerasi Ekonomi Kerakyatan & Pelestarian Lingkungan	Pembangunan Sektor Unggulan & SDM Berkarakter
Tahapan RENSTRA				
Mengembangkan produktivitas sektor ekonomi, infrastruktur dasar dan pengembangan Sumber Daya Manusia	Penguatan Infrastruktur dasar ekonomi dan akselerasi daya saing yang inklusif	Penguatan ekosistem ekonomi dan peningkatan Sumber Daya Manusia dan keberdayaan	Inovasi dan penguatan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing	Perwujudan tata kelola pembangunan sektor unggulan yang berkelanjutan
Akuntabilitas :	Akuntabilitas :	Akuntabilitas :	Akuntabilitas :	Akuntabilitas :
Penyusunan dan pengawasan pelaksanaan program pengembangan UMKM	Pelaporan rutin dan evaluasi capaian pembangunan ekonomi inklusif	Audit kinerja program peningkatan kapasitas produksi	Monitoring dampak sosial dan lingkungan program ekonomi kerakyatan	Laporan akhir capaian pembangunan dan tata kelola sektor unggulan
Inovasi :	Inovasi :	Inovasi :	Inovasi :	Inovasi :
Digitalisasi proses perizinan dan pemasaran produk UMKM	Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam proses produksi	Pengembangan platform e-commerce lokal berbasis komunitas	Inovasi produk berbasis kearifan lokal dan keberlanjutan lingkungan	Penerapan smart governance dalam pengelolaan sektor unggulan
Kegiatan Strategis Utama :	Kegiatan Strategis Utama :	Kegiatan Strategis Utama :	Kegiatan Strategis Utama :	Kegiatan Strategis Utama :
- Pengembangan pasar digital untuk UMKM - Peningkatan kapasitas pelaku usaha melalui pelatihan	- Fasilitasi akses pembiayaan mikro - Pengembangan infrastruktur pasar tradisional dan modern	- Pemberdayaan koperasi dan kelompok usaha - Penguatan jejaring pemasaran produk unggulan	- Penerapan sistem sertifikasi produk ramah lingkungan - Pengembangan usaha berbasis ekonomi hijau	- Konsolidasi sektor unggulan dan penguatan SDM berkarakter - Pengembangan kemitraan strategis dengan sektor swasta dan akademik

3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Arah Kebijakan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 merupakan rangkaian kebijakan operasional yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Kebijakan ini merupakan implementasi dari Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Arah kebijakan disusun secara komprehensif untuk menjawab berbagai isu strategis dan tantangan pembangunan di sektor perdagangan, koperasi, dan usaha kecil menengah di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Beberapa poin utama dalam arah kebijakan tersebut antara lain :

1. Pengembangan layanan publik berbasis digitalisasi, yang diwujudkan melalui sistem layanan digital terintegrasi. Sistem ini mencakup proses perizinan, promosi produk unggulan daerah, pemasaran produk UMKM, serta tata kelola koperasi. Pendekatan ini didukung dengan pelatihan dan pendampingan bagi pelaku UMKM serta pengurus koperasi guna memperkuat kapasitas yang berbasis teknologi informasi.
2. Pengembangan produk unggulan daerah berbasis potensi lokal, melalui fasilitasi kemitraan dan jaringan pasar, penjaminan stabilitas harga serta ketersediaan barang pokok penting, penyediaan sarana dan prasarana produksi, peningkatan kapasitas riset dan inovasi dengan kolaborasi bersama lembaga riset dan perguruan tinggi, serta pengaturan tata niaga dan perlindungan produk unggulan daerah. Upaya ini juga didukung dengan penyelenggaraan event berskala lokal hingga nasional guna meningkatkan eksposur produk.
3. Pendampingan, pembinaan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM, melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha dan pengurus koperasi secara berkelanjutan, pengembangan bidang usaha sesuai segmen pasar, fasilitasi akses perbankan, serta penataan zona pedagang kaki lima dan pelaku UMKM guna menciptakan ruang usaha yang tertib dan kondusif.
4. Pengembangan tata niaga produk unggulan dengan orientasi ekspor, yang dilakukan melalui penyiapan gerai oleh-oleh dan kuliner khas Selayar di luar daerah, pembangunan sistem informasi dan potensi investasi daerah, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif untuk menarik investasi guna mendukung ekspansi pasar produk unggulan.

Dengan mengacu pada arah kebijakan tersebut, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar menegaskan komitmennya sebagai motor penggerak utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang menyeluruh dan berkelanjutan. Dinas bertekad untuk terus bersikap adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi informasi serta dinamika pasar global yang semakin kompleks dan kompetitif. Selain itu, Dinas juga mengedepankan inovasi dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya lokal dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah secara optimal guna menciptakan nilai tambah ekonomi yang signifikan.

Melalui strategi yang terpadu dan pelaksanaan kebijakan yang efektif, Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM berkomitmen untuk menghadapi berbagai tantangan era digital dan globalisasi secara proaktif. Hal ini bertujuan memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah, serta menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Tabel 3.5
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan RENSTRA	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Pengembangan dan penerapan SPBE / layanan digital terintegrasi di perangkat daerah, termasuk interoperabilitas data antar sistem	Meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi	• Pengembangan dan implementasi sistem layanan digital terintegrasi untuk perizinan, promosi produk unggulan Daerah, pemasaran produk UMKM dan layanan tata kelola koperasi • Pelatihan dan pendampingan pelaku UMKM dan pengurus/pengawas koperasi berbasis digitalisasi	Mendukung SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) sesuai Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018, program Bangga Buatan Indonesia (BBI) dari Kemenkop UKM, serta transformasi digital UMKM oleh Kementerian Perdagangan
2.	Standar teknis produk daerah, sertifikasi, dan protokol hilirisasi berbasis regulasi nasional	Hilirisasi sumber daya alam unggulan, dan meningkatkan kapasitas riset inovasi	• Fasilitasi kemitraan dan jaringan pasar produk unggulan • Menjamin stabilitas harga dan ketersediaan barang pokok penting lainnya • Penyiapan sarana dan prasarana produksi bagi pelaku UMKM dan Koperasi yang memproduksi produk unggulan Daerah • Peningkatan kapasitas riset dan inovasi pelaku unggulan melalui kolaborasi dengan lembaga riset perguruan tinggi dan industri • Pengaturan tataniaga dan proteksi produk unggulan Daerah • Fasilitasi penyelenggaraan event berskala lokal, regional dan nasional	Mendukung Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019 tentang RPJMN 2020-2024 terkait pengembangan hilirisasi industri dan inovasi, serta program hilirisasi nasional

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan RENSTRA	Keterangan
1	2	3	4	5
3.	Pedoman standar pembinaan koperasi dan UMKM, prosedur kontrol internal, kriteria kelayakan usaha & pendampingan	Meningkatkan pembangunan perdesaan mewujudkan desa mandiri	• Peningkatan kapasitas pelaku usaha dan pengurus koperasi melalui pendampingan, pembinaan dan pengawasn yang berkelanjutan • Pengembangan bidang usaha berdasarkan segmen Pasar dan fasilitasi akses perbankan bagi koperasi dan UMKM • Penataan zona pedagang kaki lima dan pelaku UMKM	Mendukung Program Nasional Membangun Desa Menata Kota serta Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 13 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
4.	Regulasi investasi dan ekspor daerah yang sejalan dengan kebijakan nasional tentang iklim usaha	Menciptakan iklim usaha untuk menarik investasi	• Penyiapan gerai oleh-oleh dan kuliner Khas Selayar di Luar Daerah. • Membangun sistem informasi dan potensi investasi Daerah • Mendukung iklim investasi yang kondusif bagi investor	Mendukung Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Negatif Investasi (DNI) dan kebijakan nasional terkait peningkatan ekspor produk unggulan daerah

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menyajikan rencana program, kegiatan, dan subkegiatan yang menjadi instrumen operasional dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah dirumuskan dalam bab sebelumnya. Perumusan program dan kegiatan ini mengacu pada prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025–2029, serta selaras dengan arah kebijakan nasional dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang berlaku dalam urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah.

Program, kegiatan, dan subkegiatan disusun berdasarkan pendekatan kinerja dengan indikator yang terukur, agar memudahkan dalam pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan Renstra secara efektif. Penyusunan ini juga mempertimbangkan keterpaduan lintas bidang dan keselarasan antar level pemerintahan, dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

Melalui bab ini, ditampilkan pula target kinerja tiap program dan kegiatan secara tahunan dalam periode 2025–2029, sebagai acuan dalam proses perencanaan tahunan (Renja), penganggaran, hingga pelaporan kinerja tahunan perangkat daerah. Dengan demikian, keseluruhan upaya ini diharapkan mampu mendorong terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas serta penguatan peran sektor perdagangan, koperasi, dan UMKM dalam pembangunan ekonomi daerah.

4.1 Kerangka Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar

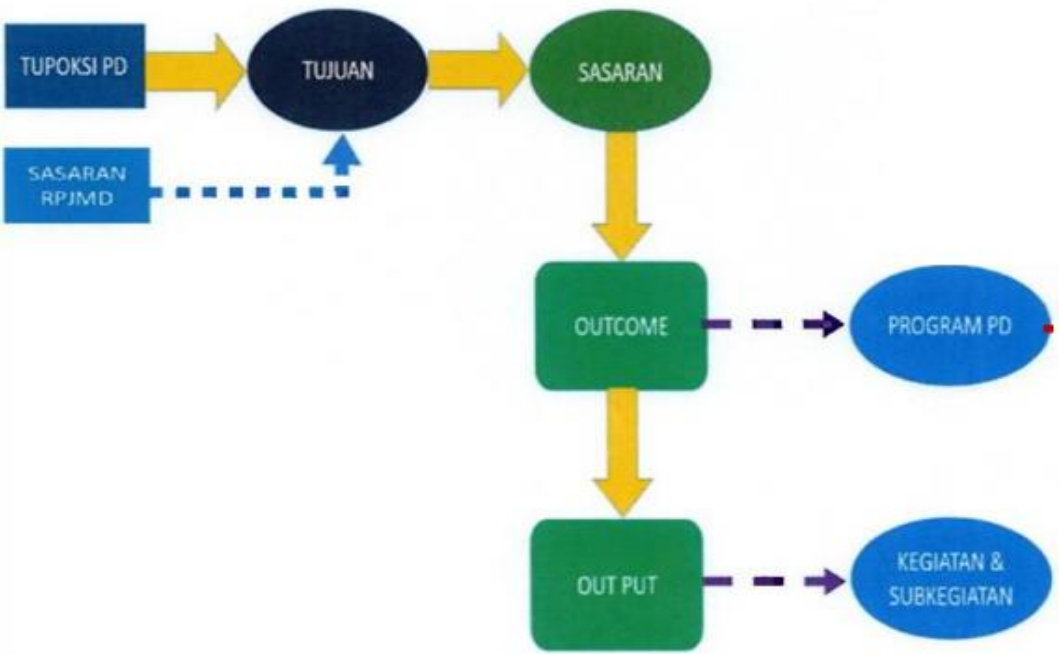
Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025–2029 disusun berdasarkan pendekatan kinerja dan berbasis hasil (*result-based planning*). Kerangka ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program yang dijalankan mampu menjawab isu-isu strategis dan mendukung pencapaian tujuan serta sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025–2029.

Penyusunan program dan kegiatan tidak dilakukan secara parsial, tetapi dikembangkan melalui integrasi logis dari sasaran strategis Renstra yang telah diturunkan dari sasaran RPJMD. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang diusulkan memiliki dasar perencanaan

yang kuat, selaras dengan arah pembangunan daerah, serta sesuai dengan kewenangan dan fungsi perangkat daerah.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan juga disusun mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM, serta mempertimbangkan kebijakan nasional seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), program prioritas nasional, dan regulasi teknis lainnya. Pendekatan ini menjamin keterpaduan antara perencanaan pusat dan daerah, serta memperkuat posisi sektor perdagangan, koperasi, dan UMKM sebagai pilar utama penguatan ekonomi lokal.

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar



Setiap program utama dijabarkan secara sistematis ke dalam kegiatan dan sub kegiatan yang lebih rinci, disertai dengan indikator kinerja, target tahunan, serta alokasi sumber daya yang dibutuhkan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan perencanaan yang terukur, akuntabel, dan dapat dievaluasi secara berkala.

Dengan adanya kerangka ini, diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar selama periode Renstra 2025–2029 dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Selain itu, dokumen ini juga menjadi acuan penting dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan serta sebagai dasar pelaporan dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

4.2 Teknik Merumuskan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renstra Disdag. KUKM Kabupaten Kepulauan Selayar

Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar dilakukan melalui proses yang sistematis dan berorientasi pada pencapaian tujuan strategis serta sasaran yang telah ditetapkan. Teknik perumusan ini mengacu pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan yang terpadu, realistis, serta berbasis data dan analisis kebutuhan sektor.

Tahapan perumusan dimulai dengan pemetaan isu strategis dan tantangan yang dihadapi oleh sektor perdagangan, koperasi, dan UMKM di Kabupaten Kepulauan Selayar. Selanjutnya, isu-isu tersebut diterjemahkan ke dalam sasaran dan tujuan strategis yang akan menjadi dasar bagi penyusunan program.

Setiap program dirumuskan dengan memperhatikan kesesuaian antara tujuan strategis dengan output yang diharapkan, serta kontribusinya terhadap pencapaian sasaran Renstra. Program tersebut kemudian diuraikan menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih spesifik dan terukur, yang secara langsung dapat dijalankan oleh unit pelaksana teknis.

Dalam tahap perumusan kegiatan, dilakukan identifikasi aktivitas-aktivitas utama yang diperlukan untuk mewujudkan output program. Setiap kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, target capaian, serta sumber daya yang diperlukan, sehingga memudahkan pengendalian pelaksanaan dan evaluasi hasil.

Sub kegiatan dirancang sebagai bagian terkecil yang mendukung terlaksananya kegiatan utama secara efektif dan efisien. Penetapan sub kegiatan juga memperhitungkan aspek teknis pelaksanaan di lapangan, dengan melibatkan koordinasi lintas fungsi serta mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia dan anggaran.

Teknik perumusan ini juga mengintegrasikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), seperti transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, serta mengacu pada regulasi dan pedoman teknis dari kementerian terkait, termasuk NSPK dan kebijakan nasional yang relevan.

Dengan menggunakan teknik perumusan yang terstruktur ini, Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar diharapkan dapat menghasilkan program dan kegiatan yang tidak hanya relevan dan tepat sasaran, tetapi juga dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi pengembangan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Tabel 4.2
Perumusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Peraturan Menteri PAN-RB No. 15 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) : Meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, penguatan birokrasi akuntabel, transparan, dan partisipatif	Mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan mendorong ekonomi lokal yang tangguh melalui penguatan koperasi, UMKM, dan perdagangan berbasis teknologi dan potensi daerah	SS.1 Menguatkan tata kelola dan layanan publik berbasis digital yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat			- Indeks Kepuasan Layanan Publik - Nilai SAKIP	
			Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan daerah dalam perencanaan, pengelolaan sumber daya, serta pelayanan publik		Persentase peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik daerah	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
				Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah secara tepat waktu dan akurat	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun dan disahkan tepat waktu	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
						Sub Kegiatan : - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						• Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD • Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akurat	Persentase laporan keuangan SKPD yang disampaikan tepat waktu	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
						Sub Kegiatan : • Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN • Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN • Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD • Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD • Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD • Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan • Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD • Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Terselenggaranya pengelolaan barang milik daerah yang tertib dan akuntabel	Persentase laporan barang milik daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
						Sub Kegiatan : • Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD • Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD • Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD • Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD • Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD • Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD • Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
				Terselenggaranya pengelolaan retribusi daerah yang tertib dan akuntabel	Persentase laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu	Kegiatan : Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
						Sub Kegiatan : • Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah • Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah • Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah • Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah • Pengolahan Data Retribusi Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						• Penetapan Wajib Retribusi Daerah • Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
				Terselenggaranya administrasi kepegawaian yang efektif dan mendukung peningkatan kinerja ASN	Persentase data kepegawaian yang terkelola dengan akurat dan tepat waktu	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
						Sub Kegiatan : • Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai • Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya • Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian • Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian • Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai • Pemulangan Pegawai yang Pensiun • Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas • Pemindahan Tugas ASN • Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi • Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan • Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
				Terselenggaranya administrasi umum yang mendukung kelancaran operasional perangkat daerah	Persentase penyediaan sarana dan prasarana administrasi yang terpenuhi sesuai kebutuhan dan tepat waktu	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Sub Kegiatan : • Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor • Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor • Penyediaan Peralatan Rumah Tangga • Penyediaan Bahan Logistik Kantor • Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan • Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan • Penyediaan Bahan/Material • Fasilitas Kunjungan Tamu • Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD • Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD • Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
				Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintahan sesuai kebutuhan dan tepat waktu	Persentase pengadaan barang milik daerah yang selesai tepat waktu sesuai rencana	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
						Sub Kegiatan : • Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan • Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan • Pengadaan Mebel • Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Terwujudnya penyediaan jasa penunjang pemerintahan yang handal dan tepat waktu	Persentase penyediaan jasa penunjang pemerintahan yang berjalan sesuai jadwal dan standa	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						Sub Kegiatan : • Penyediaan Jasa Surat Menyurat • Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik • Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik • Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Terjaganya kondisi barang milik daerah penunjang pemerintahan dalam keadaan baik dan layak pakai	Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai jadwal dan standar	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						Sub Kegiatan : • Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan • Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan • Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Peraturan Menteri Perdagangan No. 34 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Stabilitas Harga dan Ketersediaan Barang Pokok RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar : Meningkatnya Stabilitas ekonomi makro daerah		SS.2 : Pengembangan sistem perdagangan untuk mendukung hilirisasi serta meningkatkan stabilitas harga barang pokok yang efisien dan terjangkau			Tingkat stabilitas harga bahan pokok (inflasi bahan pokok %) dan ketersediaan stok bahan pokok (hari stok tersedia)	
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting		Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Program : Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
				Terjaminnya ketersediaan dan aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	Persentase agen dan pasar rakyat dengan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting yang mencukupi	Kegiatan : Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
						Sub Kegiatan : • Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat • Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat • Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Terkendalinya harga dan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di pasar kabupaten / kota secara efektif	Persentase pasar kabupaten/kota dengan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting yang sesuai ketentuan	Kegiatan : Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
						Sub Kegiatan : • Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota • Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan • Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
Peraturan Menteri Perdagangan No. 34 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Stabilitas Harga dan Ketersediaan Barang Pokok RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar : Meningkatnya Stabilitas ekonomi makro daerah		SS.3 : Meningkatkan kontribusi koperasi terhadap perekonomian desa yang terintegrasi dalam rantai pasok dan jaringan pasar berbasis digitalisasi			Persentase koperasi dan UMKM yang memiliki legalitas lengkap, sertifikasi, dan akses pasar yang memadai	
			Meningkatnya kualitas dan kuantitas koperasi yang memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam (IUSP)		Persentase peningkatan jumlah koperasi yang memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam (IUSP)	Program : Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Terselenggaranya penerbitan izin usaha simpan pinjam serta pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas koperasi simpan pinjam di wilayah kabupaten/kota	Jumlah izin usaha simpan pinjam dan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, serta kantor kas koperasi yang diterbitkan di kabupaten/kota	Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi		Persentase peningkatan jumlah koperasi aktif dibanding tahun sebelumnya	Program : Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
			Terselenggaranya pemeriksaan dan pengawasan terhadap kesehatan, kemandirian, dan kepatuhan koperasi simpan pinjam di wilayah kabupaten/kota	Terselenggaranya pemeriksaan dan pengawasan terhadap kesehatan, kemandirian, dan kepatuhan koperasi simpan pinjam di wilayah kabupaten/kota	Persentase koperasi simpan pinjam yang diawasi dan diperiksa sesuai jadwal pengawasan di kabupaten/kota	Kegiatan : Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
						Sub Kegiatan : • Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota • Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota
			Meningkatnya kesehatan dan kualitas kelembagaan KSP/USP koperasi		Persentase KSP/USP koperasi yang memiliki predikat "sehat" berdasarkan hasil penilaian resmi	Program : Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi
			Terselenggaranya penilaian kesehatan dan pemberian penghargaan kepada Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam di wilayah kabupaten/kota	Terselenggaranya penilaian kesehatan dan pemberian penghargaan kepada Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam di wilayah kabupaten/kota	Jumlah KSP/USP yang dinilai kesehatannya dan diberikan penghargaan di kabupaten/kota	Kegiatan : Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
						Sub Kegiatan : • Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
			Meningkatnya kualitas SDM Perkoperasian		Persentase pengelola koperasi yang memiliki sertifikat kompetensi manajerial koperasi	Program : Pendidikan dan Latihan Perkoperasi
				Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman serta kompetensi SDM koperasi di wilayah kabupaten/kota	Jumlah peserta koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian di kabupaten/kota	Kegiatan : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
						Sub Kegiatan : Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
			Meningkatnya kinerja usaha koperasi sektor produksi pasca pemberdayaan		Persentase koperasi sektor produksi yang mengalami peningkatan volume usaha pasca pemberdayaan	Program : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
				Terselenggaranya pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang meningkatkan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, pembiayaan, kelembagaan, serta kesadaran keluarga di wilayah kabupaten/kota	Persentase koperasi yang mengalami peningkatan produktivitas dan penguatan kelembagaan setelah pemberdayaan	Kegiatan : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Sub Kegiatan : - Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
			Meningkatnya kemandirian, produktivitas, dan daya saing UMKM binaan		- Persentase UMKM binaan yang naik kelas - Persentase UMKM yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan pasca panen - Persentase pertumbuhan jumlah UMKM binaan aktif dibanding tahun sebelumnya	Program : Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
				Terselenggaranya pemberdayaan usaha mikro melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan pemangku kepentingan	Persentase usaha mikro yang memperoleh kemudahan perizinan dan peningkatan kapasitas kelembagaan	Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
						Sub Kegiatan : - Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro - Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						• Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro • Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro • Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro • Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan
			Meningkatnya daya saing UMKM		• Persentase UMKM yang mengembangkan produk unggulan berbasis potensi lokal • Persentase UMKM yang berhasil memasarkan produknya melalui platform digital	Program : Pengembangan UMKM
				Terlaksananya fasilitasi pengembangan usaha mikro menuju usaha kecil melalui peningkatan produksi, pemasaran, SDM, serta pemanfaatan desain dan teknologi	Jumlah usaha mikro yang mengalami peningkatan skala menjadi usaha kecil setelah difasilitasi	Kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
						Sub Kegiatan : Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha		Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi	Program : Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
				Terlaksananya fasilitasi perizinan pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan secara terintegrasi	Jumlah izin yang diterbitkan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi elektronik (OSS) di bidang perdagangan	Kegiatan : Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
						Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
						Kegiatan : Penerbitan Tanda Daftar Gudang
						Sub Kegiatan : Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang
						Kegiatan : Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri
						Sub Kegiatan : - Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya kualitas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) sesuai standar		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Program : Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
				Terselenggaranya pelaksanaan tera, tera ulang, dan pengawasan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) secara legal dan berkala	Persentase UTTP yang telah dilakukan tera dan tera ulang sesuai ketentuan	Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
						Sub Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 3 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Berbasis Digital RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar : Meningkatkan nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri pengolahan		SS.4 : Meningkatkan kapasitas produksi, kualitas, dan akses pasar industri pengolahan berbasis sumber daya alam lokal yang berorientasi ekspor			Persentase peningkatan nilai tambah produk olahan sumber daya alam (SDA) lokal	
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi		Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	Program : Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
				Tersedianya dan terkelolanya sarana distribusi perdagangan yang mendukung kelancaran arus barang dan pelayanan perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan/atau difasilitasi pengelolaannya	Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Sub Kegiatan : • Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan • Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
			Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor		Nilai ekspor perdagangan	Program : Pengembangan Ekspor
				Terselenggaranya promosi dan pengembangan produk ekspor unggulan melalui pameran, misi dagang, dan pembinaan pelaku usaha	umlah produk ekspor unggulan yang dipromosikan melalui pameran dan misi dagang	Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
						Sub Kegiatan : • Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota • Pameran Dagang Nasional • Pameran Dagang Lokal • Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan • Peningkatan Citra Produk Ekspor • Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri		- Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/ dilaksanakan - Persentase produk lokal UMKM yang mendapatkan fasilitas promosi dan pemasaran melalui kemitraan	Program : Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
				Terselenggaranya promosi, pemasaran, dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota	Persentase peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada sektor perdagangan daerah	Kegiatan : Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
						Sub Kegiatan : - Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota - Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota - Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan

4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025–2029 disusun berdasarkan hasil identifikasi tujuan dan sasaran strategis yang telah dirumuskan sebelumnya. Perencanaan ini dilakukan dengan pendekatan holistik dan terintegrasi, guna memastikan bahwa setiap program dan kegiatan benar-benar relevan, tepat sasaran, dan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

Perumusan rencana program tidak hanya memperhatikan urgensi dan efektivitas capaian sasaran, tetapi juga mempertimbangkan keterjangkauan dalam pembiayaan, potensi dukungan lintas sektor, serta kelayakan implementasi secara teknis dan administratif. Setiap program dijabarkan ke dalam kegiatan dan sub kegiatan yang lebih rinci, dengan indikator kinerja dan target yang terukur serta terencana secara tahunan selama periode Renstra.

Dalam perencanaan pendanaan, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menggunakan pendekatan *indicative budgeting*, yang memperkirakan kebutuhan anggaran berdasarkan analisis kebutuhan nyata, proyeksi ketersediaan sumber daya fiskal daerah, serta peluang pembiayaan alternatif seperti dana transfer pusat, hibah, kemitraan swasta (*public-private partnership*), atau skema pembiayaan inovatif lainnya.

Setiap program dan kegiatan dirancang untuk memiliki keberlanjutan dan kesinambungan, baik dari aspek substansi maupun pendanaannya, agar pelaksanaan pembangunan sektor perdagangan, koperasi, dan UMKM dapat berjalan secara konsisten dan bertahap. Pendanaan juga disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah, dengan tetap menjunjung prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran.

Adapun rencana program/kegiatan/sub kegiatan beserta kebutuhan pendanaannya selama lima tahun ke depan akan disajikan dalam bentuk tabel per tahun anggaran, yang memuat nama program/kegiatan, indikator kinerja, target output, serta estimasi kebutuhan anggaran. Tabel ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan, proses penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan.

Dengan adanya rencana program dan pendanaan yang tersusun secara sistematis, diharapkan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar dapat menjalankan peran strategisnya secara optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Tabel 4.3
Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan

Kode	Nomenklatur Urusan (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja Program (Outcame) dan Kegiatan (Output)	Baseline 2024	Target Kinerja dan Indikasi Kebutuhan Pendanaan											
				Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)		Tahun-5 (2030)	
				Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			Target	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														
1.01	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah														
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	80%	85%	4,727,066,000	88%	3,523,477,500	92%	3,737,534,800	96%	3,837,737,800	100%	3,765,061,700	100%	3,861,682,500
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian antara perencanaan, penganggaran, dan realisasi program / kegiatan sesuai dengan target yang ditetapkan	80%	85%	37,483,000	88%	10,000,000	92%	44,217,300	95%	61,000,000		40,000,000	98%	65,000,000
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dok.	5 Dok.	7,000,000	5 Dok.	10,000,000	5 Dok.	5,000,000	5 Dok.	10,000,000	5 Dok.	7,000,000	5 Dok.	10,000,000
1.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok.	1 Dok.	5,000,000	-	-	1 Dok.	9,217,300	1 Dok.	10,000,000	1 Dok.	6,000,000	1 Dok.	10,000,000
1.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok.	1 Dok.	5,000,000	-	-	1 Dok.	5,000,000	1 Dok.	7,000,000	1 Dok.	6,000,000	1 Dok.	9,000,000
1.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok.	1 Dok.	5,000,000	-	-	1 Dok.	5,000,000	1 Dok.	7,000,000	1 Dok.	6,000,000	1 Dok.	9,000,000
1.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok.	1 Dok.	5,000,000	-	-	1 Dok.	5,000,000	1 Dok.	7,000,000	1 Dok.	5,000,000	1 Dok.	9,000,000
1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Lap.	4 Lap.	5,000,000	-	-	4 Lap.	5,000,000	4 Lap.	10,000,000	4 Lap.	5,000,000	4 Lap.	9,000,000
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Lap.	5 Lap.	5,483,000	-	-	5 Lap.	10,000,000	5 Lap.	10,000,000	5 Lap.	5,000,000	5 Lap.	9,000,000
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi keuangan tepat waktu sesuai ketentuan	70%	75%	2,902,245,200	80%	2,462,939,900	85%	2,483,438,900	90%	2,496,939,900	95%	2,495,528,900	95%	2,510,939,900
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 O/B	39 O/B	2,891,783,000	32 O/B	2,462,939,900	30 O/B	2,462,939,900	30 O/B	2,462,939,900	30 O/B	2,462,939,900	30 O/B	2,462,939,900
1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap.	1 Lap.	6,611,000	-	-	1 Lap.	7,000,000	1 Lap.	14,000,000	1 Lap.	14,589,000	1 Lap.	25,000,000

Kode	Nomenklatur Urusan (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja Program (Outcame) dan Kegiatan (Output)	Baseline 2024	Target Kinerja dan Indikasi Kebutuhan Pendanaan											
				Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)		Tahun-5 (2030)	
				Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			Target	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	4 Lap.	4 Lap.	3,851,200	-	-	4 Lap.	13,499,000	4 Lap.	20,000,000	4 Lap.	18,000,000	4 Lap.	23,000,000
1.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan Barang Milik Daerah yang tertib dan tepat waktu	70%	78%	10,370,300	-	-	90%	32,000,000	95%	40,474,000	100%	38,000,000	100%	47,000,000
1.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Lap.	4 Lap.	10,370,300	-	-	4 Lap.	32,000,000	4 Lap.	40,474,000	4 Lap.	38,000,000	4 Lap.	47,000,000
1.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase penyeteroran pendapatan daerah oleh OPD sesuai ketentuan dan tepat waktu	70%	75%	25,000,000	82%	13,700,000	88%	29,499,000	92%	39,474,000	100%	30,000,000	100%	43,000,000
1.01.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	7 Lap.	7 Lap.	25,000,000	7 Lap.	6,200,000	7 Lap.	7,000,000	7 Lap.	11,474,000	7 Lap.	10,000,000	7 Lap.	15,000,000
1.01.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	-	-	-	7 Dok	7,500,000	7 Dok	22,499,000	7 Dok	28,000,000	7 Dok	20,000,000	7 Dok	28,000,000
1.01.01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Nomenklatur Urusan (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja Program (Outcame) dan Kegiatan (Output)	Baseline 2024	Target Kinerja dan Indikasi Kebutuhan Pendanaan											
				Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)		Tahun-5 (2030)	
				Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			Target	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang sesuai prosedur dan tepat waktu	80%	85%	23,630,000	88%	5,000,000	92%	15,000,000	95%	25,000,000	100%	17,000,000	100%	27,000,000
1.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dok.	4 Dok.	14,100,000	4 Dok.	5,000,000	4 Dok.	5,000,000	4 Dok.	10,000,000	4 Dok.	7,000,000	4 Dok.	12,000,000
1.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dok.	2 Dok.	9,530,000	-	-	2 Dok.	10,000,000	2 Dok.	15,000,000	2 Dok.	10,000,000	2 Dok.	15,000,000
1.01.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai Yang Meninggal Dalam Melaksanakan Tugas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana sesuai prosedur dan tepat waktu	78%	83%	651,441,500	87%	293,456,800	91%	305,456,800	95%	331,375,100	100%	318,454,800	100%	331,817,800
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	70 Paket	70 Paket	145,199,500	70 Paket	52,361,800	70 Paket	64,361,800	70 Paket	70,282,100	70 Paket	69,361,800	70 Paket	72,805,800
1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	94 Paket	94 Paket	72,000,000	94 Paket	56,443,000	94 Paket	56,443,000	94 Paket	65,443,000	94 Paket	60,443,000	94 Paket	65,362,000
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	510 Lap.	510 Lap.	6,720,000	520 Lap.	10,002,000	520 Lap.	10,002,000	520 Lap.	15,000,000	520 Lap.	12,000,000	520 Lap.	16,000,000

Kode	Nomenklatur Urusan (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Baseline 2024	Target Kinerja dan Indikasi Kebutuhan Pendanaan											
				Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)		Tahun-5 (2030)	
				Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			Target	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	282 Lap.	300 Lap.	427,522,000	320 Lap.	174,650,000	330 Lap.	174,650,000	340 Lap.	180,650,000	350 Lap.	176,650,000	350 Lap.	177,650,000
1.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan dan tepat waktu	30%	30%	16,950,000	-	-	35%	-	35%	-	35%	-	35%	-
1.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	16,950,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang sesuai kebutuhan dan tepat waktu	75%	82%	819,186,000	86%	677,220,800	90%	677,842,800	95%	685,844,800	100%	675,998,000	100%	682,844,800
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Lap.	100 Lap.	9,650,000	100 Lap.	4,998,000	100 Lap.	4,998,000	100 Lap.	10,000,000	100 Lap.	5,998,000	100 Lap.	7,000,000
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Lap.	3 Lap.	165,448,000	3 Lap.	119,378,000	3 Lap.	120,000,000	3 Lap.	122,000,000	3 Lap.	120,000,000	3 Lap.	122,000,000
1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	52 Lap.	52 Lap.	644,088,000	52 Lap.	552,844,800	52 Lap.	552,844,800	52 Lap.	553,844,800	52 Lap.	550,000,000	52 Lap.	553,844,800

Kode	Nomenklatur Urusan (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja Program (Outcame) dan Kegiatan (Output)	Baseline 2024	Target Kinerja dan Indikasi Kebutuhan Pendanaan											
				Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)		Tahun-5 (2030)	
				Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			Target	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara secara berkala sesuai standar teknis	72%	80%	240,760,000	85%	61,160,000	90%	150,080,000	95%	157,630,000	100%	150,080,000	100%	154,080,000
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15	15	123,780,000	15	51,450,000	15	51,450,000	15	55,000,000	15	51,450,000	15	52,450,000
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	26,350,000	10 Unit	9,710,000	10 Unit	8,000,000	10 Unit	10,000,000	10 Unit	8,000,000	10 Unit	9,000,000
1.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	90,630,000	-	-	2 Unit	90,630,000	2 Unit	92,630,000	2 Unit	90,630,000	2 Unit	92,630,000
1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan / Rehabilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Nilai Pagu Indikatif Bidang Urusan Pemerintahan Daerah					4,727,066,000		3,523,477,500		3,737,534,800		3,837,737,800		3,765,061,700		3,861,682,500

Kode	Nomenklatur Urusan (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja Program (Outcame) dan Kegiatan (Output)	Baseline 2024	Target Kinerja dan Indikasi Kebutuhan Pendanaan											
				Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)		Tahun-5 (2030)	
				Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			Target	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar														
2.17	Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah														
2.17.02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase izin usaha simpan pinjam koperasi yang diterbitkan tepat waktu sesuai ketentuan	-	-	-	-	-	92%	-	96%	-	100%	-	100%	-
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi tepat waktu sesuai ketentuan berlaku	-	-	-	-	-	90%	-	95%	-	100%	-	100%	-
2.17.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerbitan izin pembukaan kantor cabang/kantor kas koperasi tepat waktu sesuai ketentuan	-	-	-	-	-	90%	-	95%	-	100%	-	100%	-
2.17.02.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa secara berkala sesuai ketentuan	-	-	-	-	-	85%	95,003,400	90%	117,133,600	95%	131,742,400	95%	162,442,400
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang diawasi dan diperiksa secara berkala sesuai ketentuan	-	-	-	-	-	85%	95,003,400	90%	117,133,600	95%	131,742,400	95%	162,442,400
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperas Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Unit Usaha	-	-	-	-	30 Unit Usaha	47,501,700	45 Unit Usaha	58,566,800	60 Unit Usaha	65,871,200	80 Unit Usaha	81,221,200
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	15 Unit Usaha	-	-	-	-	30 Unit Usaha	47,501,700	45 Unit Usaha	58,566,800	60 Unit Usaha	65,871,200	80 Unit Usaha	81,221,200

Kode	Nomenklatur Urusan (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja Program (Outcame) dan Kegiatan (Output)	Baseline 2024	Target Kinerja dan Indikasi Kebutuhan Pendanaan											
				Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)		Tahun-5 (2030)	
				Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			Target	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.17.04	Program Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi	Persentase KSP/USP koperasi yang dinilai kesehatannya sesuai pedoman penilaian kesehatan koperasi	-	-	-	-	-	85%	28,698,200	90%	38,435,900	95%	45,442,000	95%	54,977,700
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase KSP/USP koperasi lokal yang dinilai kesehatannya sesuai pedoman penilaian kesehatan koperasi	-	-	-	-	-	85%	28,698,200	90%	38,435,900	95%	45,442,000	95%	54,977,700
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	-	-	-	-	-	30 Unit Usaha	14,349,100	35 Unit Usaha	19,217,950	40 Unit Usaha	22,721,000	45 Unit Usaha	27,488,850
2.17.04.2.01.02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	-	-	-	-	-	5 Unit Usaha	14,349,100	7 Unit Usaha	19,217,950	9 Unit Usaha	22,721,000	11 Unit Usaha	27,488,850
2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasi	Persentase koperasi atau SDM koperasi yang mengikuti pelatihan sesuai kebutuhan daerah	-	-	-	-	-	75%	103,279,000	85%	125,614,800	90%	165,266,400	90%	191,876,200
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi lokal (wilayah keanggotaan kabupaten/kota) yang menerima pelatihan perkoperasian	-	-	-	-	-	75%	103,279,000	85%	125,614,800	90%	165,266,400	90%	191,876,200
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	-	-	-	-	-	264 Org	103,279,000	264 Org	125,614,800	264 Org	165,266,400	264 Org	191,876,200
2.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi aktif yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan dan perlindungan	12%	15%	37,517,000	17%	15,000,000	20%	225,468,400	23%	241,432,600	26%	245,050,600	30%	265,089,100
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi lokal yang mendapat fasilitasi pemberdayaan dan perlindungan kelembagaan/hukum	12%	15%	37,517,000	17%	15,000,000	20%	225,468,400	23%	241,432,600	26%	245,050,600	30%	265,089,100
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	-	-	-	-	-	100 Org	112,734,200	125 Org	120,716,300	150 Org	122,525,300	175 Org	132,544,550
2.17.06.2.01.02	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	88 Klg	88 Klg	37,517,000	88 Klg	15,000,000	88 Klg	112,734,200	88 Klg	120,716,300	88 Klg	122,525,300	88 Klg	132,544,550

Kode	Nomenklatur Urusan (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja Program (Outcame) dan Kegiatan (Output)	Baseline 2024	Target Kinerja dan Indikasi Kebutuhan Pendanaan											
				Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)		Tahun-5 (2030)	
				Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			Target	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase pelaku UMKM yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan usaha	40%	60%	100,000,000	70%	10,000,000	80%	341,626,900	90%	427,497,500	95%	445,039,400	95%	446,895,700
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase usaha mikro yang terdata dan mendapatkan fasilitasi pemberdayaan terpadu sesuai pendekatan lintas sektor	30%	50%	100,000,000	65%	10,000,000	75%	341,626,900	85%	427,497,500	90%	445,039,400	90%	446,895,700
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Unit Usaha	25 Unit Usaha	-	-	-	30 Unit Usaha	56,937,817	35 Unit Usaha	71,249,583	40 Unit Usaha	74,173,233	45 Unit Usaha	74,482,617
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	20 Unit Usaha	25 Unit Usaha	100,000,000	30 Unit Usaha	10,000,000	35 Unit Usaha	56,937,817	40 Unit Usaha	71,249,583	45 Unit Usaha	74,173,233	50 Unit Usaha	74,482,617
2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	-	-	-	-	-	70 Unit Usaha	56,937,817	80 Unit Usaha	71,249,583	90 Unit Usaha	74,173,233	100 Unit Usaha	74,482,617
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	-	-	-	-	-	70 Unit Usaha	56,937,817	80 Unit Usaha	71,249,583	90 Unit Usaha	74,173,233	100 Unit Usaha	74,482,617
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	-	-	-	-	-	50 Org	56,937,816	55 Org	71,249,584	60 Org	74,173,234	65 Org	74,482,616
2.17.07.2.01.06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	-	-	-	-	-	50 Org	56,937,816	55 Org	71,249,584	60 Org	74,173,234	65 Org	74,482,616
2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Persentase pelaku UMKM yang mengalami peningkatan kapasitas usaha setelah intervensi program	35%	50%	785,000,000	-	-	70%	793,805,400	80%	784,326,700	90%	866,938,600	90%	1,001,963,000
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase usaha mikro binaan yang meningkat skala usahanya menjadi usaha kecil	10%	20%	785,000,000	-	-	40%	793,805,400	50%	784,326,700	60%	866,938,600	60%	1,001,963,000
2.17.08.2.01.01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	50 Unit Usaha	20 Unit Usaha	785,000,000	-	-	40 Unit Usaha	793,805,400	50 Unit Usaha	784,326,700	60 Unit Usaha	866,938,600	60 Unit Usaha	1,001,963,000

Kode	Nomenklatur Urusan (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja Program (Outcame) dan Kegiatan (Output)	Baseline 2024	Target Kinerja dan Indikasi Kebutuhan Pendanaan											
				Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)		Tahun-5 (2030)	
				Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			Target	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Jumlah Nilai Pagu Indikatif Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, dan UKM					922,517,000		25,000,000		1,587,881,300		1,734,441,100		1,899,479,400		2,123,244,100
3	Urusan Pemerintahan Pilihan														
3.30	BIDANG URUSAN PERDAGANGAN														
3.30.02	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha perdagangan yang memiliki izin usaha perdagangan (SIUP/NIB)	60%	70%	-	-	-	85%	3,813,000	90%	5,526,700	95%	6,814,200	95%	8,461,800
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase pelaku usaha dan pengelola yang memiliki izin resmi sesuai ketentuan perundang-undangan	-	-	-	-	-	85%	3,813,000	90%	5,526,700	95%	1,814,200	95%	8,461,800
3.30.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-	-	-	-	-	30 Dok.	3,813,000	30 Dok.	5,526,700	30 Dok.	1,814,200	30 Dok.	3,461,800
3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase gudang yang beroperasi dengan Tanda Daftar Gudang yang sah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.30.02.2.02.01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	-	-		-	-	-	-	-	-	-		-	-
3.30.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Jumlah penerima waralaba dalam negeri yang memiliki STPW sah sesuai ketentuan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
3.30.02.2.03.01	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.30.02.2.03.02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.30.02.2.04	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
3.30.02.2.04.01	Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.30.02.2.04.02	Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Nomenklatur Urusan (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Baseline 2024	Target Kinerja dan Indikasi Kebutuhan Pendanaan											
				Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)		Tahun-5 (2030)	
				Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			Target	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.30.02.2.05.01	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.30.02.2.06.01	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.30.02.2.06.02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.30.02.2.06.03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.30.02.2.07	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dok.	5,000,000	1 Dok.	5,000,000
3.30.02.2.07.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dok.	5,000,000	1 Dok.	5,000,000
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan yang layak dan berfungsi sesuai standar	-	-	200,000,000	-	-	75%	144,972,900	85%	154,293,000	95%	155,816,800	95%	167,845,000
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan dikelola secara fungsional	2 Unit Usaha	-	200,000,000	-	-	2 Unit Usaha	70,000,000	2 Unit Usaha	79,320,100	2 Unit Usaha	80,843,900	2 Unit Usaha	92,872,100
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2 Unit Usaha	2 Unit Usaha	200,000,000	-	-	2 Unit Usaha	70,000,000	2 Unit Usaha	79,320,100	2 Unit Usaha	80,843,900	2 Unit Usaha	92,872,100
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah pengelola sarana distribusi yang dibina dan memperoleh peningkatan kapasitas	-	-	-	-	-	2 Dok.	74,972,900	2 Dok.	74,972,900	2 Dok.	74,972,900	2 Dok.	74,972,900
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	-	-	-	-	-	1 Dok.	35,000,000	1 Dok.	35,000,000	1 Dok.	35,000,000	1 Dok.	35,000,000
3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	-	-	-	-	-	1 Dok.	39,972,900	1 Dok.	39,972,900	1 Dok.	39,972,900	1 Dok.	39,972,900

Kode	Nomenklatur Urusan (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja Program (Outcame) dan Kegiatan (Output)	Baseline 2024	Target Kinerja dan Indikasi Kebutuhan Pendanaan											
				Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)		Tahun-5 (2030)	
				Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			Target	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.30.04	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase kestabilan harga barang kebutuhan pokok dan penting pada level yang terkendali	85%	88%	50,000,000	90%	15,000,000	92%	224,902,500	93%	235,239,100	95%	227,474,000	95%	324,666,600
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah intervensi distribusi barang pokok dan penting yang dilakukan dalam setahun	-	-	-	-	-	1 Lap.	20,000,000	1 Lap.	20,000,000	1 Lap.	20,000,000	1 Lap.	50,000,000
3.30.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	-	-	-	-	-	1 Lap.	20,000,000	1 Lap.	20,000,000	1 Lap.	20,000,000	1 Lap.	50,000,000
3.30.04.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.30.04.2.01.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase pasar yang dipantau secara rutin terkait harga dan stok barang kebutuhan pokok dan penting	1 Lap	1 Lap	50,000,000	1 Lap	15,000,000	2 Lap	204,902,500	2 Lap	215,239,100	2 Lap	207,474,000	2 Lap	274,666,600
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Lap.	1 Lap.	50,000,000	1 Lap.	15,000,000	1 Lap.	70,000,000	1 Lap.	80,336,600	1 Lap.	80,336,600	1 Lap.	100,000,000
3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	1 Lap.	134,902,500	1 Lap.	134,902,500	1 Lap.	127,137,400	1 Lap.	174,666,600
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.30.04.2.03.01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.30.04.2.03.02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Nomenklatur Urusan (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja Program (Outcame) dan Kegiatan (Output)	Baseline 2024	Target Kinerja dan Indikasi Kebutuhan Pendanaan											
				Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)		Tahun-5 (2030)	
				Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			Target	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Jumlah pelaku usaha/produk lokal yang difasilitasi dalam kegiatan promosi dan ekspor	-	-	-	-	-	20 PU	54,657,500	25 PU	55,432,000	30 PU	53,679,600	30 PU	55,731,300
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha/produk ekspor unggulan yang difasilitasi mengikuti promosi melalui pameran atau misi dagang	-	-	-	-	-	4 PU	54,657,500	4 PU	55,432,000	4 PU	53,679,600	4 PU	55,731,300
3.30.05.2.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	-	-	-	-	-	2 PU	25,000,000	2 PU	25,000,000	2 PU	23,247,600	2 PU	23,247,600
3.30.05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.30.05.2.01.04	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	-	-	-	-	-	2 PU	29,657,500	2 PU	30,432,000	2 PU	30,432,000	2 PU	32,483,700
3.30.05.2.01.05	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.30.05.2.01.06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.30.06	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah	60%	70%	-	75%	-	80%	45,884,000	85%	72,586,300	90%	72,473,200	90%	100,561,000
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase UTTP yang bertanda tera sah yang berlaku	60%	70%	-	75%	-	80%	45,884,000	85%	72,586,300	90%	72,473,200	90%	100,561,000
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	-	-	-	-	-	300 Unit	45,884,000	350 Unit	50,000,000	400 Unit	50,000,000	450 Unit	70,561,000
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	-	-	-	-	-	-	-	12 Lap	22,586,300	12 Lap	22,473,200	12 Lap	30,000,000
3.30.06.2.01.03	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.30.07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan partisipasi pelaku usaha lokal dalam program promosi produk dalam negeri	60%	70%	-	-	-	80%	80,153,500	85%	103,988,200	90%	112,351,200	90%	127,697,300
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah kegiatan promosi/pameran produk dalam negeri yang difasilitasi oleh pemerintah daerah	1 Keg.	1 Keg.	-	-	-	1 Keg.	80,153,500	1 Keg.	103,988,200	1 Keg.	112,351,200	1 Keg.	127,697,300
3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	23,988,200	-	23,988,200	-	28,988,200
3.30.07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	-	-	-	-	-	25 UMKM	50,000,000	25 UMKM	50,000,000	25 UMKM	58,363,000	25 UMKM	63,363,000
3.30.07.2.01.03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	-	-	-	-	-	1 Dok.	30,153,500	1 Dok.	30,000,000	1 Dok.	30,000,000	1 Dok.	35,346,100

Kode	Nomenklatur Urusan (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja Program (Outcame) dan Kegiatan (Output)	Baseline 2024	Target Kinerja dan Indikasi Kebutuhan Pendanaan											
				Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun-4 (2028)		Tahun-5 (2029)		Tahun-5 (2030)	
				Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			Target	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.30.07.2.01.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Jumlah Nilai Pagu Indikatif Bidang Urusan Perdagangan					250,000,000		15,000,000		554,383,400		627,065,300		628,609,000		784,963,000
Total Pagu Indikatif Renstra				2025	5,899,583,000	2026	3,563,477,500	2027	5,879,799,500	2028	6,199,244,200	2029	6,293,150,100	2030	6,769,889,600

4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menetapkan sejumlah sub kegiatan prioritas yang selaras dengan arah kebijakan nasional dan daerah. Sub kegiatan ini dirancang untuk memperkuat kontribusi sektor perdagangan, koperasi, dan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Penetapan sub kegiatan prioritas mempertimbangkan aspek strategis seperti urgensi pembangunan daerah, efektivitas terhadap capaian outcome program prioritas, daya ungkit terhadap kesejahteraan masyarakat, serta keterpaduan dengan arah kebijakan fiskal dan investasi daerah.

Sub kegiatan prioritas yang dimaksud tersebar dalam beberapa program utama, di antaranya :

1. **Penguatan Fiskal Daerah**

Fokus pada stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan kelancaran distribusi barang penting. Kegiatan meliputi :

- Koordinasi dan pengendalian ketersediaan barang di pasar rakyat;
- Pemantauan harga dan stok bahan pokok;
- Pelaksanaan operasi pasar reguler dan khusus.

Sub kegiatan ini mendukung keberlanjutan daya beli masyarakat dan pengendalian inflasi di tingkat daerah.

2. **Pemerataan Pembangunan Ekonomi dan Penguatan UMKM**

Sub kegiatan mencakup :

- Pemberdayaan koperasi, pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi;
- Fasilitasi penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam (IUSP);
- Pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
- Pemberdayaan usaha mikro secara menyeluruh, mulai dari pendataan, kemitraan, hingga peningkatan kapasitas SDM;
- Pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil (UMK naik kelas);
- Fasilitasi perizinan pasar rakyat dan pengawasan metrologi legal.

Seluruh kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat kelembagaan koperasi dan mendorong pertumbuhan UMKM yang inklusif dan berkelanjutan.

3. **Hilirisasi Ekonomi Hijau dan Biru Berbasis Potensi Lokal**

Kegiatan prioritas mencakup penyediaan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan yang efisien, terintegrasi, dan ramah lingkungan.

Hal ini menjadi bagian dari upaya memperkuat infrastruktur perdagangan yang mendukung potensi sumber daya lokal kelautan, perikanan, dan pertanian secara berkelanjutan.

4. **Hilirisasi Sumber Daya Alam Berbasis UMKM**

Mendukung pengembangan produk unggulan daerah berorientasi ekspor, dengan fokus pada :

- Pameran dagang dan misi dagang;
- Pembinaan pelaku usaha ekspor;
- Promosi dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- Penguatan sistem informasi perdagangan.

Tujuannya adalah meningkatkan nilai tambah, daya saing, serta memperluas akses pasar bagi produk-produk UMKM Kabupaten Kepulauan Selayar.

Melalui pelaksanaan sub kegiatan prioritas tersebut, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berkomitmen untuk memberikan kontribusi nyata dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah secara konsisten, terarah, dan berdampak langsung kepada masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang tangguh, inklusif, dan berkeadilan.

Tabel 4.4

Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Penguatan Fiskal Daerah	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Kegiatan : Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan : • Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat • Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Kegiatan : Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : • Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota • Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan • Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Mendukung Penguatan Fiskal Daerah dengan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok agar daya beli masyarakat terjaga dan perekonomian daerah stabil

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
2.	Pemerataan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan penguatan UMKM	Meningkatnya kualitas dan kuantitas koperasi yang memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam (IUSP)	Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten / Kota Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten / Kota	Mendukung pemerataan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan penguatan UMKM melalui peningkatan akses iizin usaha simpan pinjam bagi koperasi
			Kegiatan : Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota Sub Kegiatan : - Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperas Kewenangan Kabupaten/Kota - Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendukung pemerataan ekonomi yang berkeadilan dengan pengawasan koperasi agar tetap sehat dan aktif
			Kegiatan : Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Mendorong pengelolaan koperasi yang profesional dan sehat untuk penguatan ekonomi daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
			Sub Kegiatan : • Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota • Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Kegiatan : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Meningkatkan kompetensi SDM koperasi guna mendukung penguatan kelembagaan koperasi daerah
			Kegiatan : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : • Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota • Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Meningkatkan daya saing dan keberlanjutan koperasi sebagai pilar ekonomi daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
			Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Sub Kegiatan : • Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro • Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro • Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro • Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro • Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro • Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Mendukung pengembangan UMKM secara inklusif untuk pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan
			Kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Sub Kegiatan : Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Mendorong UMKM naik kelas dan berdaya saing guna memperkuat ekonomi daerah dan nasional

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
			Kegiatan : Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Mempermudah proses legalisasi usaha untuk mendukung iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah
			Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Sub Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Menjamin mutu dan keadilan perdagangan serta perlindungan konsumen sebagai upaya meningkatkan kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi daerah
3.	Huluisasi ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis potensi unggulan loka	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Mendukung pengembangan sarana distribusi yang ramah lingkungan untuk memperkuat ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis potensi lokal daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
4.	Hilirisasi sumber daya alam berbasis UMKM	• Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor • Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam neger	Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : • Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota • Pameran Dagang Nasional • Pameran Dagang Lokal • Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan • Peningkatan Citra Produk Ekspor • Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Mendorong pengembangan ekspor produk hasil hilirisasi sumber daya alam yang dikelola oleh UMKM untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing daerah
			Kegiatan : Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Sub Kegiatan : • Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota • Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota • Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Meningkatkan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri untuk memperkuat UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran kunci yang digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025–2029.

IKU disusun dengan mempertimbangkan prinsip SMART (Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) serta relevansinya dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Setiap indikator dipilih untuk mencerminkan keluaran dan dampak nyata dari program dan kegiatan yang dilaksanakan, baik dari aspek pelayanan publik, peningkatan daya saing koperasi dan UMKM, maupun stabilitas sektor perdagangan di daerah.

Berikut adalah daftar Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk periode 2025–2029 :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan (Alasan dipilih sebagai IKU)
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Indeks Kepuasan Layanan Publik	Persentase	75	80	85	90	95	95	Mengukur kualitas pelayanan publik digital secara langsung
2.	Nilai SAKIP	Persentase	75	80	85	90	95	95	Mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mendukung reformasi birokrasi
3.	Persentase koperasi dan UMKM yang memiliki legalitas lengkap, sertifikasi, dan akses pasar memadai	Persentase	60	70	80	90	100	100	Mewakili aspek kualitas dan daya saing usaha
4.	Persentase pertumbuhan jumlah UMKM binaan aktif dibanding tahun sebelumnya	Persentase	8	10	12	15	18	18	Menggambarkan pertumbuhan sektor UMKM
5.	Tingkat stabilitas harga bahan pokok (inflasi bahan pokok %) dan ketersediaan stok bahan pokok (hari stok tersedia)	Inflasi % dan hari stok	75	80	85	90	95	95	Mengukur pelayanan dan stabilitas ekonomi makro terkait kebutuhan pokok
6.	Persentase peningkatan nilai tambah produk olahan sumber daya alam (SDA) lokal	Persentase	5	7	9	11	13	13	Menunjukkan peningkatan kualitas dan nilai produk lokal yang berorientasi ekspor

4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan instrumen penting dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan strategis di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disdag. KUKM) Kabupaten Kepulauan Selayar selama periode 2025–2029. IKK bersifat lebih teknis dan operasional dibandingkan Indikator Kinerja Utama (IKU), namun tetap menjadi acuan utama dalam menilai pencapaian sasaran strategis Renstra dan mendukung realisasi visi-misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Penyusunan IKK dilakukan dengan mengacu pada prinsip *SMART* (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound), serta selaras dengan arah kebijakan nasional dan daerah. IKK juga berfungsi sebagai dasar dalam pengendalian internal, monitoring dan evaluasi, serta menjadi instrumen akuntabilitas kinerja perangkat daerah secara periodik.

Berikut adalah daftar **Indikator Kinerja Kunci (IKK)** Disdag. KUKM Kabupaten Kepulauan Selayar beserta satuan dan target tahunannya :

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan (Alasan dipilih sebagai IKK)
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase peningkatan jumlah koperasi yang memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam (IUSP)	Persentase	60	70	80	90	100	100	Legalitas usaha koperasi yang spesifik dan terukur
2.	Persentase koperasi yang memiliki predikat "sehat" berdasarkan hasil penilaian resmi	Persentase	50	55	60	65	70	70	Kualitas koperasi secara operasional
3.	Persentase pengelola koperasi yang memiliki sertifikat kompetensi manajerial	Persentase	30	40	50	60	70	70	Kompetensi sumber daya manusia
4.	Persentase UMKM yang berhasil memasarkan produknya melalui platform digital	Persentase	20	30	40	50	60	60	Terukur, spesifik, dan mendukung pemasaran produk
5.	Persentase UMKM binaan yang naik kelas	Persentase	2.5	3.00	3,5	4.00	4.5	4.5	Output langsung dari pemberdayaan UMKM
6.	Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persentase	70	75	80	85	90	90	Mendukung pengawasan dan kualitas perdagangan
7.	Persentase koperasi sektor produksi yang mengalami peningkatan volume usaha pasca pemberdayaan	Persentase	20	30	40	50	60	60	Mendukung pertumbuhan koperasi secara nyata

4.7 Analisis Kesesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar bertujuan untuk menciptakan kesinambungan antara perencanaan strategis dan operasional, serta memastikan bahwa seluruh kegiatan perangkat daerah dapat diukur, dikendalikan, dan dievaluasi secara terarah dan terukur.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merepresentasikan capaian strategis perangkat daerah dalam mendukung sasaran pembangunan jangka menengah daerah, sementara Indikator Kinerja Kunci (IKK) menggambarkan ukuran keberhasilan atas pelaksanaan program dan sub kegiatan yang lebih teknis. Oleh karena itu, keterkaitan antara keduanya menjadi landasan penting dalam membangun sistem kinerja yang akuntabel dan terintegrasi.

Berikut ini disajikan analisis kesesuaian antara IKU dan IKK dalam bentuk tabel :

Tabel 4.7
Analisis Kesesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang Mendukung	Keterangan Hubungan
1	2	3	4
1.	Indeks Kepuasan Layanan Publik	IKK 4 : Persentase UMKM yang berhasil memasarkan produknya melalui platform digital	Langsung mendukung , karena kepuasan layanan publik terkait dengan kemudahan akses pemasaran digital
2.	Nilai SAKIP	Seluruh IKK secara tidak langsung, terutama IKK 1-7	Kinerja birokrasi yang akuntabel dicapai melalui pelaksanaan program yang terukur dan indikator yang konsisten
3.	Persentase koperasi dan UMKM yang memiliki legalitas lengkap, sertifikasi, dan akses pasar memadai	- IKK 1 : Persentase peningkatan jumlah koperasi yang memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam (IUSP) - IKK 2 : Persentase koperasi yang memiliki predikat "sehat" - IKK 3 : Persentase pengelola koperasi yang memiliki sertifikat kompetensi manajerial	Saling menopang , legalitas dan sertifikasi mendukung kualitas dan daya saing koperasi dan UMKM
4.	Persentase pertumbuhan jumlah UMKM binaan aktif dibanding tahun sebelumnya	- IKK 5 : Persentase UMKM binaan yang naik kelas - IKK 7 : Persentase koperasi sektor produksi yang mengalami peningkatan volume usaha pasca pemberdayaan	Mendukung langsung , peningkatan volume usaha koperasi sektor produksi pasca pemberdayaan merupakan salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan jumlah UMKM binaan aktif serta peningkatan kualitas UMKM (naik kelas)
5.	Tingkat stabilitas harga bahan pokok dan ketersediaan stok bahan pokok	IKK 6 : Persentase alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah	Sangat relevan , stabilitas harga didukung oleh pengawasan alat ukur dan ketepatan pengawasan harga
6.	Persentase peningkatan nilai tambah produk olahan sumber daya alam (SDA) lokal	IKK 4 : Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	Langsung mendukung , peningkatan nilai tambah produk dipengaruhi oleh sarana perdagangan yang memadai

4.8 Penetapan Target TPB/SDGs Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025–2030

Penetapan Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disdag. KUKM) Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan bagian penting dalam mengintegrasikan komitmen global ke dalam kebijakan dan program pembangunan daerah secara operasional.

Target TPB/SDGs yang ditetapkan dalam periode 2025–2030 difokuskan pada **Tujuan SDGs 8: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua**. Hal ini sejalan dengan mandat Disdag. KUKM dalam mendorong pertumbuhan UMKM, penguatan koperasi, penciptaan lapangan kerja, serta perluasan akses pelaku usaha terhadap jasa keuangan formal.

Salah satu indikator kunci yang ditetapkan adalah **Proporsi UMKM yang mengakses kredit dari lembaga keuangan formal** (Indikator 8.3.1.a). Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat inklusi keuangan pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, serta sebagai refleksi dari keberhasilan kebijakan daerah dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Target indikator ini ditetapkan secara bertahap mulai dari baseline tahun 2024 sebesar **12,16%**, dan ditargetkan meningkat setiap tahun hingga mencapai **16,72% pada tahun 2030**, dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah, dukungan regulasi, serta sinergi lintas sektor, termasuk perbankan, koperasi simpan pinjam, dan lembaga pembiayaan lainnya.

Penetapan target ini juga menjadi bagian dari upaya penguatan sistem monitoring dan evaluasi pembangunan berbasis SDGs, serta mendukung pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar dalam meningkatkan stabilitas ekonomi makro daerah dan daya saing sektor UMKM.

Berikut adalah tabel Target TPB/SDGs Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025–2030 :

Tabel 4.8
Penetapan Target TPB/SDGs Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2030

Kode Indikator	Target / Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Pencapaian SDGs Tahun						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Tujuan SDGs 08 : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA										
8.3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.										
8.3.1.(a)	Proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal	Dinas Perdagkum	%	12,16	12,92	13,68	14,44	15,20	15,96	1672	Dinas Perdagkum

4.9 Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)

Rumusan pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) menjadi acuan utama untuk mengevaluasi keberhasilan pencapaian sasaran strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar. Pengukuran dilakukan melalui indikator-indikator kinerja yang dirancang untuk dapat mengukur variabel terkait secara tepat dan objektif.

Tabel 4.8 menyajikan rumusan lengkap IKSS yang mencakup sasaran strategis, indikator kinerja, variabel yang diukur, metode atau cara pengukuran indikator, penanggung jawab, serta sumber data yang digunakan. Rumusan ini mendukung pengelolaan kinerja secara terukur dan sistematis.

Berikut ringkasan rumusan IKSS berdasarkan sasaran strategis :

Tabel 4.8

Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
SS.1	Menguatkan tata kelola dan layanan publik berbasis digital yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Layanan Publik	Nilai rata-rata kepuasan layanan publik	Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan digital	Tim IKM OPD	Hasil survei IKM, laporan evaluasi layanan publik
		Nilai SAKIP	Skor SAKIP instansi pemerintah	Penilaian dan pelaporan akuntabilitas kinerja sesuai metodologi KemenPAN-RB	Tim Akuntabilitas Kinerja	Laporan SAKIP tahunan
SS.2	Meningkatkan stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok untuk mendukung daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi makro daerah	Tingkat stabilitas harga bahan pokok (inflasi bahan pokok %) dan ketersediaan stok bahan pokok (hari stok tersedia)	Jumlah komoditas tersedia vs. jumlah komoditas yang wajib tersedia	$(\text{Jumlah komoditas kebutuhan pokok yang tersedia di pasar} \div \text{Jumlah total komoditas yang dipantau}) \times 100\%$	Bidang Perdagangan	Laporan monitoring pasar, SP2KP, survei lapangan
		Persentase koperasi dan UMKM yang memiliki legalitas lengkap, sertifikasi, dan akses pasar yang memadai	Jumlah koperasi/UMKM yang memiliki NIB, sertifikasi, dan akses pasar	$(\text{Jumlah koperasi/UMKM yang memenuhi ketiganya} \div \text{Total koperasi/UMKM binaan}) \times 100\%$	Bidang Koperasi dan UKM	Database UMKM/Koperasi binaan, OSS, data sertifikasi dan kemitraan
SS.3	Meningkatkan legalitas, kapasitas, dan daya saing koperasi serta UMKM melalui pemberdayaan, sertifikasi, dan fasilitasi akses pasar guna mendukung peningkatan nilai tambah industri pengolahan	Persentase peningkatan jumlah koperasi yang memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam (IUSP)	Jumlah koperasi dengan IUSP	$((\text{Jumlah koperasi dengan IUSP tahun berjalan} - \text{tahun sebelumnya}) \div \text{Jumlah tahun sebelumnya}) \times 100\%$	Bidang Koperasi dan UKM	Data perizinan koperasi (OSS, Dinas Koperasi)
		Persentase KSP/USP koperasi yang memiliki predikat "sehat" berdasarkan hasil penilaian resmi	Jumlah koperasi aktif dan koperasi aktif kategori sehat	$(\text{Jumlah koperasi aktif kategori sehat} \div \text{Jumlah koperasi aktif}) \times 100\%$	Bidang Koperasi dan UKM	Laporan klasifikasi kesehatan koperasi

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Variabel	Cara Pengukuran Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		Persentase pengelola koperasi yang memiliki sertifikat kompetensi manajerial koperasi	Jumlah pengelola koperasi bersertifikat	$(\text{Jumlah pengelola koperasi bersertifikat} \div \text{Jumlah total pengelola koperasi}) \times 100\%$	Bidang Koperasi dan UKM	Data sertifikasi SDM koperasi (BNSP, Lembaga Sertifikasi)
		Persentase koperasi sektor produksi yang mengalami peningkatan volume usaha pasca pemberdayaan	Kenaikan volume usaha koperasi	$(\text{Jumlah koperasi dengan peningkatan volume usaha} \div \text{Total koperasi sektor produksi binaan}) \times 100\%$	Bidang Koperasi dan UKM	Laporan kegiatan pemberdayaan, laporan keuangan koperasi
		Persentase UMKM binaan yang naik kelas	Jumlah UMKM naik kelas (mikro → kecil, kecil → menengah)	$(\text{Jumlah UMKM binaan yang naik kelas} \div \text{Total UMKM binaan}) \times 100\%$	Bidang Koperasi dan UKM	Data klasifikasi dan pendampingan UMKM
		Persentase pertumbuhan jumlah UMKM binaan aktif dibanding tahun Sebelumnya	Jumlah UMKM binaan aktif	$((\text{Jumlah UMKM aktif tahun berjalan} - \text{tahun sebelumnya}) \div \text{Tahun sebelumnya}) \times 100\%$	Bidang Koperasi dan UKM	Database UMKM binaan
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah UTTP bertanda tera sah	$(\text{Jumlah UTTP bertanda tera sah} \div \text{Total UTTP yang wajib tera}) \times 100\%$	Bidang Perdagangan	Laporan tera ulang, register UTTP
SS.4	Meningkatkan kapasitas produksi, kualitas, dan akses pasar industri pengolahan berbasis sumber daya alam lokal yang berorientasi ekspor	Persentase peningkatan nilai tambah produk olahan sumber daya alam (SDA) lokal	Nilai produksi dan nilai bahan baku	$((\text{Nilai produksi} - \text{Nilai bahan baku}) \div \text{Nilai bahan baku}) \times 100\%$	Bidang Perdagangan	Laporan produksi industri, survei IKM, laporan ekspor

BAB I PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang disusun untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang perdagangan, koperasi, dan usaha kecil dan menengah selama periode lima tahun. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025–2029, serta mempertimbangkan arah kebijakan nasional, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), serta kondisi aktual dan kebutuhan pembangunan daerah.

Penyusunan Renstra ini bertujuan untuk menjamin adanya konsistensi, keterpaduan, dan kesinambungan antara perencanaan pembangunan jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan (Rencana Kerja dan APBD). Dengan demikian, Renstra ini menjadi dokumen yang strategis dalam memastikan setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan benar-benar mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara terukur, efektif, dan efisien.

Dalam dokumen ini telah dirumuskan secara sistematis visi dan misi Kepala Daerah yang diturunkan ke dalam sasaran strategis Dinas, tujuan strategis, indikator kinerja utama (IKU), indikator kinerja kunci (IKK), serta indikator kinerja sasaran strategis (IKSS). Penjabaran indikator-indikator ini dilengkapi dengan metode pengukuran, variabel yang diukur, penanggung jawab, serta sumber data yang digunakan, guna memastikan akurasi dan objektivitas dalam proses evaluasi kinerja.

Secara umum, fokus strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kepulauan Selayar pada periode 2025–2029 mencakup :

1. Penguatan tata kelola dan pelayanan publik berbasis digital, dalam rangka mewujudkan birokrasi yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE);
2. Stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok, sebagai bentuk perlindungan daya beli masyarakat, stabilitas ekonomi daerah, serta memperkuat ketahanan sektor perdagangan;
3. Peningkatan legalitas, kapasitas, dan daya saing koperasi dan UMKM, melalui fasilitasi perizinan, pendampingan usaha, pelatihan manajerial, serta penguatan akses pasar dan pembiayaan;
4. Penguatan hilirisasi produk berbasis sumber daya lokal melalui peningkatan nilai tambah dan orientasi ekspor, sejalan dengan strategi pembangunan ekonomi daerah berbasis potensi unggulan lokal;

5. Pengembangan sarana dan prasarana perdagangan yang efisien, inklusif, dan ramah lingkungan, guna mendukung penguatan ekonomi hijau dan biru berbasis komunitas lokal.

Renstra ini juga menetapkan sub kegiatan prioritas yang secara langsung mendukung program prioritas pembangunan daerah, seperti penguatan fiskal daerah, pemerataan pembangunan ekonomi yang berkeadilan, hilirisasi ekonomi hijau dan biru, serta transformasi ekonomi berbasis digital dan UMKM.

Seluruh perencanaan program dan kegiatan dirancang dengan pendekatan berbasis kinerja, di mana capaian hasil bukan hanya diukur dari output administratif, tetapi juga dari dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi lokal, dan perbaikan kualitas layanan publik. Hal ini didukung oleh penyusunan indikator yang relevan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.

Dengan disusunnya Renstra ini, diharapkan Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar dapat meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program secara menyeluruh. Dokumen ini menjadi instrumen penting dalam mewujudkan visi pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, serta berdaya saing, khususnya dalam memperkuat sektor ekonomi rakyat melalui peran aktif perdagangan, koperasi, dan UMKM sebagai pilar utama perekonomian lokal.

Ditetapkan di : Benteng
Pada tanggal : 25 September 2025

KEPALA DINAS,

ANDI ABDURRAHMAN, S.E., M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19670526 199703 1 005

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

MUHAMMAD NATSIR ALI

LAMPIRAN :
MATRIKS PEMETAAN VISI, MISI, & PROGRAM
PRIORITAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TERPILIH PERIODE 2025-2029

TABEL :
MATRIKS PEMETAAN VISI, MISI, & PROGRAM PRIORITAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH

VISI	KATA KUNCI VISI	MISI	ASTA CITA	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM KERJA	KEGIATAN	PROGRAM PERMENDAGRI NOMOR 90	TEMA PEMBANGUNAN	RENCANA AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bersama Membawa Selayar Maju & Sejahtera	Maju	3. Meningkatkan Pengelolaan Perekonomian Daerah	Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Fiskal Daerah	Program Hilirisasi Sumber Daya Alam	1 Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting : Penguatan produksi pangan lokal Kemandirian Pangan Daerah, yang bertujuan meningkatkan produksi padi Jampae, peternakan, buah, dan sayur untuk memenuhi kebutuhan pangan lokal 2 Hilirisasi dan Pengolahan Produk Lokal : Hilirisasi Sumber Daya Alam dan Pengembangan Usaha Koperasi Di dalamnya ada kegiatan pengendalian harga komoditas 3 Fasilitasi distribusi dan pemasaran produk : Melanjutkan fasilitasi pemasaran / pengiriman produk hilirisasi hasil UMKM dan menyambut investasi Menjaga kelancaran distribusi dan harga yang stabil	1 Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pengembangan Produk Kelapa Terpadu (Gemerlap)	Tujuan : Menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting melalui penguatan sistem distribusi, pemantauan pasar, dan intervensi kebijakan yang tepat sasaran Sasaran : Tersedianya pasokan produk kebutuhan pokok yang stabil dan terjangkau melalui peningkatan kapasitas, kualitas, dan jangkauan pemasaran produk UMKM di sektor pangan, pertanian, perikanan, dan perkebunan Aksi : 1 Penguatan koordinasi dan sinkronisasi distribusi barang kebutuhan pokok Melalui forum lintas pelaku distribusi dan pengelola pasar untuk menjaga kelancaran alur pasokan di tingkat agen dan pasar rakyat 2 Pengendalian pasokan dan distribusi untuk mencegah kelangkaan Menyusun kebijakan pengaturan stok minimum dan pemerataan distribusi antarwilayah untuk menjamin ketersediaan barang penting 3 Pemantauan harga dan stok secara berkala di tingkat distributor dan pasar rakyat Dilakukan secara langsung dan melalui pelaporan terintegrasi untuk mendeteksi potensi lonjakan harga atau kelangkaan 4 Penguatan sistem informasi perdagangan berbasis data real-time Integrasi data harga dan stok ke dalam dashboard Sistem Informasi Perdagangan untuk mendukung pengambilan keputusan cepat dan tepat 5 Pelaksanaan operasi pasar reguler dan insidental Untuk menjaga keterjangkauan harga di masyarakat, terutama menjelang hari besar keagamaan dan saat terjadi gejolak harga
				Pemerataan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan penguatan UMKM	Program Pengembangan Usaha Korporasi	1 Pembinaan manajemen produksi dan pemasaran bagi UMKM, BUMDes, Koperasi, dan/atau BUMD, dengan kegiatan : - Peningkatan kualitas produksi. - Peningkatan akses permodalan. - Peningkatan promosi produk berbasis elektronik (digitalisasi). - Peningkatan peran UMKM, BUMDes, Koperasi, dan/atau BUMD dalam pengelolaan pasca panen dan pengendalian harga komoditas. 2 Kegiatan pendukung lainnya yang relevan dengan tema pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM : - Melanjutkan pembinaan UMKM. komitmen kelanjutan program	1 Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Pembinaan Koperasi & Ekonomi Kreatif (Desa Koperasi)	Tujuan : Meningkatkan kapasitas dan jangkauan layanan Koperasi Simpan Pinjam melalui fasilitasi perizinan dan ekspansi usaha yang sesuai dengan ketentuan regulasi serta kebutuhan masyarakat Sasaran : Terselenggaranya pendampingan dan percepatan proses perizinan usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, serta kantor kas koperasi simpan pinjam yang beroperasi dalam wilayah kabupaten/kota Aksi : 1 Sosialisasi dan edukasi regulasi perizinan usaha koperasi

KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah intervensi distribusi barang pokok dan penting yang dilakukan dalam setahun	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Lap.	10,000,000	1 Lap.	20,000,000	1 Lap.	25,000,000	1 Lap.	28,000,000	1 Lap.	30,000,000
		2 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Lap.	10,000,000	1 Lap.	20,000,000	1 Lap.	25,000,000	1 Lap.	28,000,000	1 Lap.	30,000,000
2 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota	Persentase pasar yang dipantau secara rutin terkait harga dan stok barang kebutuhan pokok dan penting	1 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Lap.	50,000,000	1 Lap.	60,000,000	1 Lap.	70,000,000	1 Lap.	80,000,000	1 Lap.	90,000,000
		2 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1 Lap.	50,000,000	1 Lap.	60,000,000	1 Lap.	70,000,000	1 Lap.	80,000,000	1 Lap.	90,000,000
		3 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Lap.	50,000,000	1 Lap.	60,000,000	1 Lap.	70,000,000	1 Lap.	80,000,000	1 Lap.	90,000,000
1 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi tepat waktu sesuai ketentuan berlaku	1 Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	88 Unit Usaha	20,000,000	88 Unit Usaha	30,000,000	88 Unit Usaha	40,000,000	88 Unit Usaha	50,000,000	88 Unit Usaha	60,000,000
2 Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase penerbitan izin pembukaan kantor cabang/kantor kas koperasi tepat waktu sesuai ketentuan	1 Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	88 Unit Usaha	20000000	88 Unit Usaha	30000000	88 Unit Usaha	40000000	88 Unit Usaha	50000000	88 Unit Usaha	60000000

VISI	KATA KUNCI VISI	MISI	ASTA CITA	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM KERJA	KEGIATAN	PROGRAM PERMENDAGRI NOMOR 90	TEMA PEMBANGUNAN	RENCANA AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						- Melanjutkan fasilitasi pemasaran / pengiriman produk hilirisasi hasil UMKM - Menggerakkan perekonomian daerah menyambut investasi - Melanjutkan pembinaan koperasi menggerakkan ekonomi masyarakat di "Desa Koperasi" dan mengundang peran bapak angkat (investor) - Pengembangan usaha berbasis desa (Program Kembang Emas Desa) - Termasuk pengembangan UMKM, BUMDes, dan koperasi berbasis potensi lokal seperti : Desa Tani, Desa Wisata, Desa Nelayan dan Desa Koperasi - Hilirisasi hasil bumi dan perikanan Mendukung tumbuhnya usaha kecil dan menengah di bidang pengolahan hasil alam (petik-olah-jual) - Digitalisasi pemasaran produk lokal Termasuk dalam pembinaan manajemen lembaga usaha			Melalui penyelenggaraan bimtek dan forum diskusi dengan koperasi aktif untuk memberikan pemahaman tentang prosedur, persyaratan, dan manfaat legalitas dalam ekspansi usaha simpan pinjam 2 Pendampingan teknis penyusunan dokumen izin usaha dan pembukaan kantor cabang Memberikan bantuan langsung kepada koperasi dalam menyusun dan melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan untuk mendapatkan izin usaha dan mendirikan unit layanan tambahan 3 Koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Memastikan sinergi antar-OPD dalam proses penerbitan izin koperasi melalui sistem OSS-RBA dan mempercepat proses perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 4 Monitoring dan evaluasi kelayakan koperasi untuk ekspansi Melakukan kunjungan lapangan, evaluasi kesehatan koperasi, serta verifikasi kesiapan manajerial dan keuangan untuk membuka cabang atau kantor kas 5 Penyusunan data base koperasi potensial Mengidentifikasi koperasi aktif dan sehat secara kelembagaan sebagai calon penerima fasilitasi pengembangan wilayah layanan simpan pinjam
							2 Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Peningkatan Kapasitas Fiskal	Tujuan : Meningkatkan tata kelola dan kepastian hukum dalam pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan melalui penerbitan izin yang tepat, cepat, dan transparan demi mendukung iklim usaha yang kondusif dan terlindungi Sasaran : Tersedianya layanan perizinan pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan yang akuntabel dan mudah diakses sehingga pelaku usaha memperoleh izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku di wilayah kabupaten/kota Aksi : 1 Penyelenggaraan sosialisasi tata cara pengajuan izin pengelolaan pasar, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan Melalui workshop dan publikasi informasi agar pelaku usaha memahami persyaratan dan prosedur perizinan 2 Fasilitasi pendampingan pengajuan izin pengelolaan dan izin usaha Membantu pelaku usaha dalam melengkapi dokumen dan proses administratif yang diperlukan untuk memperoleh izin 3 Penguatan koordinasi antar instansi terkait (Dinas Perdagangan, DPMPTSP, dan instansi teknis) - Mempercepat proses verifikasi dan penerbitan izin melalui sinergi yang efektif antar OPD 4 Penerapan sistem pelayanan perizinan berbasis elektronik (online)

KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase pelaku usaha dan pengelola yang memiliki izin resmi sesuai ketentuan perundang-undangan	1 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10 Dok.	5,000,000	15 Dok.	6,000,000	20 Dok.	7,000,000	25 Dok.	8,000,000	30 Dok.	10,000,000

VISI	KATA KUNCI VISI	MISI	ASTA CITA	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM KERJA	KEGIATAN	PROGRAM PERMENDAGRI NOMOR 90	TEMA PEMBANGUNAN	RENCANA AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Mendorong penggunaan sistem perizinan daring untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kemudahan akses bagi pemohon izin 5 Monitoring dan evaluasi pemanfaatan izin usaha Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan izin guna memastikan pelaku usaha mematuhi ketentuan dan standar yang telah ditetapkan
							3 Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pembinaan Koperasi & Ekonomi Kreatif (Desa Koperasi)	Tujuan : Menjamin keteraturan, transparansi, dan kepatuhan operasional koperasi serta unit simpan pinjam dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna meningkatkan kepercayaan anggota dan keberlanjutan koperasi Sasaran : Terlaksananya pemeriksaan dan pengawasan yang rutin dan menyeluruh terhadap koperasi dan unit simpan pinjam di wilayah kabupaten/kota sehingga terdeteksi dan teratasi risiko pelanggaran, penyimpangan, dan potensi kerugian hani anggota Aksi : 1 Penyusunan jadwal pemeriksaan koperasi dan unit simpan pinjam secara berkala Menentukan prioritas pemeriksaan berdasarkan tingkat risiko dan hasil pengawasan sebelumnya 2 Pelaksanaan pemeriksaan administratif dan keuangan koperasi secara komprehensif Memeriksa kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan, laporan keuangan, dan tata kelola yang baik 3 Pengawasan langsung di lapangan dan pemantauan pelaksanaan rekomendasi pemeriksaan Melakukan inspeksi dan kunjungan kerja untuk memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan 4 Pemberian bimbingan teknis kepada pengurus koperasi dalam perbaikan pengelolaan dan pelaporan Meningkatkan kapasitas pengurus dalam menjalankan tata kelola yang sesuai aturan 5 Penerapan sistem pelaporan dan pengaduan berbasis digital Mempermudah pelaporan pelanggaran dan pengawasan secara transparan dan akuntabel
							4 Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Pusat Layanan Terpadu Nelayan dan Usaha Perikanan (Hangkoang)	Tujuan : Menilai dan memantau tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi secara berkala untuk memastikan keberlanjutan usaha, perlindungan anggota, dan optimalisasi kinerja koperasi sesuai standar yang berlaku Sasaran : Tercapainya koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang sehat secara finansial, manajerial, dan operasional di wilayah kabupaten/kota sehingga mampu memberikan manfaat optimal bagi anggotanya

KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang diawasi dan diperiksa secara berkala sesuai ketentuan	1 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperas Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	88 Unit Usaha	20,000,000	88 Unit Usaha	30,000,000	88 Unit Usaha	40,000,000	88 Unit Usaha	50,000,000	88 Unit Usaha	60,000,000
		2 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	88 Unit Usaha	20,000,000	88 Unit Usaha	30,000,000	88 Unit Usaha	40,000,000	88 Unit Usaha	50,000,000	88 Unit Usaha	60,000,000
1 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase KSP/USP koperasi lokal yang dinilai kesehatannya sesuai pedoman penilaian kesehatan koperasi	1 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	88 Unit Usaha	20,000,000	88 Unit Usaha	30,000,000	88 Unit Usaha	40,000,000	88 Unit Usaha	50,000,000	88 Unit Usaha	60,000,000
		2 Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	1 Unit Usaha	20,000,000	2 Unit Usaha	30,000,000	3 Unit Usaha	40,000,000	5 Unit Usaha	50,000,000	6 Unit Usaha	60,000,000

VISI	KATA KUNCI VISI	MISI	ASTA CITA	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM KERJA	KEGIATAN	PROGRAM PERMENDAGRI NOMOR 90	TEMA PEMBANGUNAN	RENCANA AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Aksi : 1 Pengembangan dan penerapan indikator penilaian kesehatan koperasi yang komprehensif Meliputi aspek likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan efisiensi pengelolaan 2 Pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi secara rutin dan terjadwal Melakukan evaluasi berkala terhadap laporan keuangan, aktivitas usaha, dan tata kelola koperasi 3 Penyusunan laporan hasil penilaian kesehatan dan rekomendasi perbaikan Menyampaikan temuan dan rekomendasi kepada pengurus koperasi untuk perbaikan 4 Pemberian bimbingan teknis dan pendampingan kepada koperasi yang kurang sehat Membantu perbaikan manajemen dan pengelolaan untuk meningkatkan kesehatan koperasi 5 Pengintegrasian hasil penilaian dalam sistem informasi koperasi daerah Untuk memantau perkembangan kesehatan koperasi secara real-time dan sebagai dasar pengambilan kebijakan
							5 Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pembinaan Koperasi & Ekonomi Kreatif (Desa Koperasi)	Tujuan : Meningkatkan kapasitas dan kompetensi pengurus, pengawas, dan anggota koperasi melalui pendidikan dan pelatihan yang terstruktur, agar koperasi dapat dikelola secara profesional dan berkelanjutan Sasaran : Terwujudnya pengurus dan anggota koperasi yang memiliki pengetahuan dan keterampilan cukup dalam pengelolaan koperasi di wilayah kabupaten/kota Aksi : 1 Penyusunan modul pelatihan yang sesuai kebutuhan koperasi daerah Mengembangkan materi pelatihan yang mencakup aspek manajemen, keuangan, hukum, dan teknologi informasi koperasi 2 Pelaksanaan pelatihan secara berkala untuk pengurus, pengawas, dan anggota koperasi Mengadakan workshop, seminar, dan pelatihan praktis yang mudah diakses oleh peserta 3 Fasilitasi penyebaran informasi dan metode pembelajaran inovatif Menggunakan media digital dan metode blended learning untuk meningkatkan jangkauan dan efektivitas pelatihan 4 Evaluasi dan monitoring hasil pelatihan Mengukur peningkatan pengetahuan dan penerapan hasil pelatihan dalam pengelolaan koperasi

KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi lokal (wilayah keanggotaan kabupaten/kota) yang menerima pelatihan perkoperasian	1 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	50 Orang	80,000,000	75 Orang	100,000,000	100 Orang	150,000,000	150 Orang	180,000,000	200 Orang	200,000,000

VISI	KATA KUNCI VISI	MISI	ASTA CITA	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM KERJA	KEGIATAN	PROGRAM PERMENDAGRI NOMOR 90	TEMA PEMBANGUNAN	RENCANA AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							6 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pembinaan Koperasi & Ekonomi Kreatif (Desa Koperasi)	Tujuan : Meningkatkan daya saing dan keberlanjutan koperasi melalui pemberdayaan yang optimal serta memberikan perlindungan hukum dan kelembagaan bagi koperasi di wilayah kabupaten / kota Sasaran : Terwujudnya koperasi yang kuat, mandiri, dan terlindungi dari berbagai risiko hukum dan kelembagaan di daerah kabupaten/kota Aksi : 1 Pelaksanaan sosialisasi regulasi dan perlindungan hukum koperasi Memberikan pemahaman kepada pengurus dan anggota koperasi mengenai hak, kewajiban, serta perlindungan hukum yang berlaku 2 Pendampingan teknis pengelolaan koperasi Menyediakan bimbingan dalam pengelolaan administrasi, keuangan, dan operasional koperasi untuk meningkatkan kapasitas manajerial 3 Fasilitasi akses pembiayaan dan pengembangan usaha koperasi Membantu koperasi dalam mendapatkan modal kerja, kredit usaha, dan peluang usaha baru yang sesuai dengan potensi daerah 4 Penguatan kelembagaan koperasi melalui pelatihan dan workshop Meningkatkan kualitas pengurus dan anggota koperasi agar mampu menjalankan tugas dengan profesional dan beretika 5 Monitoring dan evaluasi perlindungan serta pemberdayaan koperasi secara berkala Memastikan program pemberdayaan dan perlindungan berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi koperasi
							7 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pusat Layanan Terpadu Nelayan dan Usaha Perikanan (Hangkoang)	Tujuan : Meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha mikro melalui pemberdayaan menyeluruh, kemudahan akses perizinan, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan usaha mikro di wilayah kabupaten/kota Sasaran : Terbentuknya ekosistem usaha mikro yang mandiri, berdaya saing, berizin lengkap, serta didukung oleh kelembagaan kuat dan sumber daya manusia yang kompeten di daerah kabupaten/kota Aksi : 1 Pendataan potensi usaha mikro secara komprehensif Melakukan inventarisasi dan pemetaan usaha mikro untuk mengidentifikasi potensi dan kebutuhan pengembangan usaha 2 Fasilitasi kemitraan usaha mikro Membangun jaringan dan kolaborasi antara usaha mikro dengan pelaku usaha lain lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan terkait

KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		6 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan										
1 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase usaha mikro binaan yang meningkat skala usahanya menjadi usaha kecil	1 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi										

VISI	KATA KUNCI VISI	MISI	ASTA CITA	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM KERJA	KEGIATAN	PROGRAM PERMENDAGRI NOMOR 90	TEMA PEMBANGUNAN	RENCANA AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									3 Fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro Memberikan pendampingan dan layanan percepatan proses perizinan agar usaha mikro dapat beroperasi secara legal dan mendapatkan perlindungan hukum 4 Pemberdayaan kelembagaan usaha mikro Mendukung pembentukan dan penguatan kelembagaan usaha mikro seperti koperasi, kelompok usaha, dan asosiasi melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan 5 Koordinasi dan sinkronisasi pemberdayaan usaha mikro dengan pemangku kepentingan Menyelenggarakan forum koordinasi lintas sektor untuk menyelaraskan program dan kebijakan pemberdayaan usaha mikro 6 Peningkatan kapasitas SDM usaha mikro dan kewirausahaan Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan workshop untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi pelaku usaha mikro agar lebih profesional dan inovatif
							8 Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Produk Kelapa Terpadu (Gemerlap) Pusat Layanan Terpadu Nelayan dan Usaha Perikanan (Hangkoang)	Tujuan : Mendorong transformasi usaha mikro menjadi usaha kecil melalui peningkatan kapasitas usaha, akses pembiayaan, bantuan sarana prasarana, penguatan kelembagaan, dan fasilitasi pasar secara berkelanjutan di wilayah kabupaten/kota Sasaran : Terciptanya pelaku usaha mikro yang mampu naik kelas menjadi usaha kecil secara legal, berdaya saing, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Aksi : 1 Identifikasi dan seleksi usaha mikro potensial untuk naik kelas Melakukan pendataan dan pemetaan terhadap pelaku usaha mikro yang memiliki potensi pertumbuhan berdasarkan omzet, aset, jenis produk, dan pasar 2 Fasilitasi akses pembiayaan dan kemitraan usaha Menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan dan pelaku usaha besar untuk memberikan akses kredit dan peluang kemitraan yang mendukung ekspansi usaha 3 Peningkatan kapasitas manajerial dan teknis pelaku usaha mikro Menyelenggarakan pelatihan, pendampingan, dan konsultasi di bidang produksi, keuangan, manajemen usaha, digitalisasi, serta pengembangan produk 4 Pemberian bantuan sarana dan peralatan usaha produktif Menyediakan dukungan berupa peralatan produksi, teknologi sederhana, dan fasilitas penunjang lainnya sesuai kebutuhan jenis usaha untuk meningkatkan efisiensi dan kapasitas produksi

KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		6 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan										
1 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase usaha mikro binaan yang meningkat skala usahanya menjadi usaha kecil	1 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi										

VISI	KATA KUNCI VISI	MISI	ASTA CITA	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM KERJA	KEGIATAN	PROGRAM PERMENDAGRI NOMOR 90	TEMA PEMBANGUNAN	RENCANA AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									5 Penguatan branding dan pemasaran produk usaha mikro Melalui fasilitasi promosi digital, bantuan desain kemasan, sertifikasi produk, serta akses pasar melalui pameran dan platform e-commerce 6 Pendampingan legalitas dan perubahan status usaha Memberikan bantuan teknis dalam pengurusan perizinan berusaha (NIB, NPWP, sertifikasi), serta proses perubahan status dari usaha mikro menjadi usaha kecil 7 Monitoring dan evaluasi pertumbuhan usaha secara berkala Menyusun indikator evaluasi usaha berdasarkan peningkatan omzet, aset, tenaga kerja, dan akses pasar untuk menilai efektivitas program dan tindak lanjut kebijakan
							9 Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pengembangan Produk Kelapa Terpadu (Gemerlap)	Tujuan : Menjamin kepastian hukum dan perlindungan konsumen dalam transaksi perdagangan melalui pelaksanaan metrologi legal yang akurat, berstandar, dan berkesinambungan di wilayah kabupaten/kota Sasaran : Terwujudnya alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang tertera dan tertelusur, serta meningkatnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya metrologi legal dalam aktivitas perdagangan Aksi : 1 Pelaksanaan tera dan tera ulang alat UTTP di pasar dan pelaku usaha Melaksanakan layanan tera dan tera ulang secara berkala terhadap alat ukur seperti timbangan, alat ukur bahan bakar, meteran air, dan lainnya guna memastikan akurasi pengukuran dan kesesuaian standar 2 Pengawasan alat ukur di lokasi strategis perdagangan dan distribusi Melakukan inspeksi dan pengawasan rutin terhadap penggunaan alat ukur di pasar tradisional, SPBU, kios, dan tempat usaha lainnya untuk mencegah kecurangan dalam takaran atau ukuran 3 Sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat Memberikan pemahaman tentang pentingnya metrologi legal melalui penyuluhan, pemasangan media informasi, dan kerja sama dengan asosiasi pedagang serta pengelola pasar 4 Monitoring dan pelaporan hasil tera, tera ulang, dan pengawasan secara berkala Menyusun laporan periodik untuk mengidentifikasi tren pelanggaran, cakupan layanan, serta sebagai dasar evaluasi dan peningkatan kebijakan layanan metrologi legal

KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase UTTP yang bertanda tera sah yang berlaku	1 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	650 Unit	200,000,000	650 Unit	201,000,000	650 Unit	2,021,000,000	650 Unit	203,000,000	650 Unit	204,000,000
		2 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	231 Orang	220,000,000	231 Orang	221,000,000	231 Orang	222,000,000	231 Orang	223,000,000	231 Orang	224,000,000
		3 Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	1500 Unit	68,000,000	1500 Unit	69,000,000	1500 Unit	70,000,000	1500 Unit	71,000,000	1500 Unit	72,000,000

VISI	KATA KUNCI VISI	MISI	ASTA CITA	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM KERJA	KEGIATAN	PROGRAM PERMENDAGRI NOMOR 90	TEMA PEMBANGUNAN	RENCANA AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Huluisasi ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis potensi unggulan lokal	Program Huluisasi Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	1 Pasilitasi peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan 2 Pembinaan petani tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan 3 Pembinaan nelayan dan fasilitasi sarana perikanan tangkap 4 Pembinaan pelaku budi daya perikanan air payau 5 Pembinaan pelaku budi daya perikanan pantai	1 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pusat Layanan Terpadu Nelayan dan Usaha Perikanan (Hangkoang)	Tujuan : Meningkatkan efektivitas dan jangkauan distribusi produk perdagangan melalui pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi yang modern dan terintegrasi, guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan penguatan pemasaran produk lokal Sasaran : Tersedianya sarana distribusi yang memadai dan terkelola dengan baik sehingga mampu memperlancar alur distribusi barang, menekan biaya logistik, dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar Aksi : - Survei dan identifikasi kebutuhan sarana distribusi Melakukan pendataan dan pemetaan lokasi strategis yang membutuhkan pembangunan gudang, pusat logistik, dan fasilitas distribusi lainnya - Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur distribusi Membangun serta memperbaiki fasilitas penyimpanan, terminal distribusi, dan sarana pendukung seperti cold storage dan area bongkar muat - Pengembangan sistem manajemen distribusi berbasis digital Menerapkan teknologi informasi untuk monitoring stok, rute pengiriman, dan efisiensi rantai pasok - Pemberdayaan pengelola distribusi melalui BUMDes dan koperasi Memberikan pelatihan dan pendampingan manajemen agar BUMDes dan koperasi dapat mengelola distribusi secara profesional - Fasilitasi akses pembiayaan untuk pengembangan sarana Menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan untuk mendukung pembiayaan pengembangan sarana dan pengadaan alat transportasi - Monitoring dan evaluasi operasional sarana distribusi Melakukan pengawasan berkala dan evaluasi untuk memastikan kelancaran dan keberlanjutan pengelolaan sarana distribusi
				Hilirisasi sumber daya alam berbasis UMKM	Program Hilirisasi Sumber Daya Alam	1 Industri pengolahan hasil perikanan tangkap dan budi daya 2 Industri pengolahan hasil pertanian tanaman pangan (padi/jagung) 3 Industri pengolahan hasil tanaman hortikultura (jeruk asli Selayar) 4 Industri pengolahan hasil perkebunan (jambu mete, kelapa, pala, cendek, kopi)	1 Program Pengembangan Ekspor	DISDAGKOP. UKM	Tujuan : Meningkatkan daya saing dan akses pasar produk unggulan daerah melalui kegiatan promosi dagang yang terarah, kolaboratif, dan berorientasi ekspor guna memperkuat kontribusi daerah terhadap peningkatan ekspor nasional Sasaran : Terlaksananya promosi dagang yang efektif dan berkelanjutan melalui pameran dan misi dagang yang memperluas jaringan kemitraan usaha, meningkatkan nilai transaksi ekspor, serta memperkenalkan produk unggulan daerah ke pasar potensial dalam dan luar negeri

KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan dikelola secara fungsional	1 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	44,000,000	1 Unit	45,000,000	1 Unit	46,000,000	1 Unit	47,000,000	1 Unit	48,000,000
		2 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2 Unit	53,000,000	2 Unit	54,000,000	2 Unit	55,000,000	2 Unit	56,000,000	2 Unit	57,000,000
1 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha/produk ekspor unggulan yang difasilitasi mengikuti promosi melalui pameran atau misi dagang	1 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten / Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2 Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	2 Pelaku Usaha	50,000,000	2 Pelaku Usaha	55,000,000	2 Pelaku Usaha	60,000,000	2 Pelaku Usaha	65,000,000	2 Pelaku Usaha	70,000,000
		3 Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	2 Pelaku Usaha	37,000,000	2 Pelaku Usaha	38,000,000	2 Pelaku Usaha	39,000,000	2 Pelaku Usaha	40,000,000	2 Pelaku Usaha	41,000,000
		4 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	2 Pelaku Usaha	122,000,000	2 Pelaku Usaha	123,000,000	2 Pelaku Usaha	124,000,000	2 Pelaku Usaha	125,000,000	2 Pelaku Usaha	126,000,000

VISI	KATA KUNCI VISI	MISI	ASTA CITA	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM KERJA	KEGIATAN	PROGRAM PERMENDAGRI NOMOR 90	TEMA PEMBANGUNAN	RENCANA AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Aksi : 1 Identifikasi dan Kurasi Produk Ekspor Unggulan Daerah Melalui pendataan, seleksi, dan verifikasi produk unggulan potensial ekspor berdasarkan kualitas, kapasitas produksi, dan kesiapan pasar Hasil : Daftar produk unggulan ekspor prioritas kabupaten/kota 2 Penguatan Kapasitas Pelaku Usaha Ekspor (UMKM dan IKM) Melalui pelatihan, pendampingan, dan konsultasi bisnis terkait standar ekspor, packaging, branding, dan akses pasar internasional Hasil : Peningkatan kesiapan pelaku usaha untuk mengikuti pameran dan misi dagang 3 Penyelenggaraan Pameran Dagang Daerah (Trade Expo) Menampilkan produk unggulan ekspor daerah pada pameran berskala regional/nasional untuk menarik buyer potensial dan mitra dagang Hasil : Peningkatan promosi dan visibilitas produk daerah di pasar luas 4 Pelaksanaan Misi Dagang dan Business Matching Menghadirkan pertemuan langsung antara pelaku usaha daerah dengan calon mitra/buyer dari dalam dan luar negeri untuk menjajaki peluang kerja sama dagang Hasil : Terlaksananya pertemuan B2B dan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) 5 Pengembangan dan Promosi Digital Produk Ekspor Unggulan Melalui pembuatan katalog digital, website promosi, dan pemanfaatan media sosial untuk memperluas jangkauan pasar dan memperkenalkan produk ke buyer global Hasil : Tersedianya media promosi digital yang aktif dan mudah diakses 6 Evaluasi dan Tindak Lanjut Kerja Sama Dagang Melalui monitoring hasil kegiatan, pengukuran dampak terhadap peningkatan transaksi, serta fasilitasi tindak lanjut kerja sama dengan mitra potensial Hasil : Laporan evaluasi dan rencana keberlanjutan kemitraan ekspor daerah

KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		5 Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	6 Produk	37,000,000	6 Produk	40,000,000	6 Produk	43,000,000	6 Produk	46,000,000	6 Produk	50,000,000
		6 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VISI	KATA KUNCI VISI	MISI	ASTA CITA	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM KERJA	KEGIATAN	PROGRAM PERMENDAGRI NOMOR 90	TEMA PEMBANGUNAN	RENCANA AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							2 Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pusat Layanan Terpadu Nelayan dan Usaha Perikanan (Hangkoang)	Tujuan : Mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri (PDN) melalui promosi dan pemasaran yang efektif, guna memperkuat daya saing industri nasional serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional secara berkelanjutan Sasaran : Meningkatnya kesadaran dan preferensi masyarakat, pelaku usaha, serta instansi pemerintah dalam menggunakan produk dalam negeri melalui kegiatan promosi terpadu, peningkatan kualitas pemasaran, dan optimalisasi program P3DN (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri) Aksi : - Kampanye Cinta Produk Dalam Negeri Melalui penyelenggaraan kegiatan promosi, festival produk lokal, dan kampanye media untuk meningkatkan kebanggaan serta kesadaran masyarakat terhadap produk nasional Hasil : Peningkatan eksposur dan citra positif produk dalam negeri di masyarakat - Fasilitasi Pameran dan Bazaar Produk Lokal Unggulan Menyelenggarakan pameran dagang, expo UMKM, dan bazaar produk dalam negeri yang melibatkan pelaku usaha lokal, industri kreatif, dan instansi pemerintah Hasil : Terbukanya peluang pasar baru dan meningkatnya volume penjualan produk lokal - Penguatan Kapasitas dan Kualitas Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui pelatihan branding, digital marketing, standarisasi produk, serta pembinaan kualitas dan kemasan agar mampu bersaing dengan produk impor Hasil : Meningkatnya kompetensi pelaku usaha dan daya saing produk lokal - Optimalisasi Implementasi Program P3DN di Lingkungan Pemerintah dan Swasta Mendorong komitmen belanja pemerintah dan BUMN terhadap produk dalam negeri melalui sosialisasi regulasi, pengawasan TKDN, serta pelaporan realisasi penggunaan PDN Hasil : Meningkatnya persentase penggunaan PDN dalam pengadaan barang/jasa - Pengembangan Platform Digital Promosi dan Penjualan Produk Dalam Negeri Membangun dan memperkuat ekosistem digital marketplace nasional untuk mempermudah akses konsumen terhadap produk buatan Indonesia. Hasil : Tersedianya kanal digital aktif untuk promosi dan transaksi produk lokal

KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah kegiatan promosi / pameran produk dalam negeri yang difasilitasi oleh pemerintah daerah	1 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	100 UMKM	91,000,000	100 UMKM	92,000,000	100 UMKM	93,000,000	100 UMKM	94,000,000	100 UMKM	95,000,000
		2 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	100 UMKM	18,000,000	100 UMKM	19,000,000	100 UMKM	20,000,000	100 UMKM	21,000,000	100 UMKM	22,000,000
		3 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan										

VISI	KATA KUNCI VISI	MISI	ASTA CITA	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM KERJA	KEGIATAN	PROGRAM PERMENDAGRI NOMOR 90	TEMA PEMBANGUNAN	RENCANA AKSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									6 Monitoring, Evaluasi, dan Publikasi Dampak Penggunaan Produk Dalam Negeri Melakukan pemantauan realisasi penggunaan PDN, mengevaluasi dampak ekonomi lokal, serta mempublikasikan capaian secara periodik kepada publik Hasil : Tersusunnya laporan kinerja dan rekomendasi kebijakan peningkatan PDN.

KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24